



Pemerintah Provinsi Jambi
Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LKj

TAHUN 2020



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan RKPd Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021). Laporan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Komitmen dalam penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, geografis, sisi historis, demografis, kinerja ekonomi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Pemprov Jambi pada tahun 2020.

Kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang sehingga Jambi TUNTAS yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH,



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680109 199203 1 002

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Daerah	1
1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	1
1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi	2
1.2.3 Letak dan Kondisi Geografis	3
1.2.4 Topografi	3
1.2.5 Potensi Pengembangan Wilayah	4
1.2.6 Kondisi Demografi	5
1.2.7 Kondisi Ekonomi	6
1.2.7.1 Pertumbuhan PDRB	6
1.2.7.2 Inflasi	6
1.2.7.3 Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1 Visi dan Misi	10
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja	11
2.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja	24
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	25
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
3.2. Realisasi Anggaran	107
BAB IV PENUTUP	110

Daftar Tabel

1.1	Luas wilayah Provinsi Jambi	2
1.2	Klasifikasi ketinggian di Provinsi Jambi	3
1.3	Jumlah penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	5
1.4	Kepadatan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan Kabupaten/Kota	6
1.5	Jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Jambi menurut daerah Maret 2019 - Maret 2020	8
2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	13
2.2	Indikator Kinerja Utama	16
2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020	22
3.1	Kriteria penilaian realisasi kinerja	25
3.2	Realisasi capaian indikator kinerja utama s.d. Tahun 2020	25
3.3	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi	28
3.4	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	29
3.5	Kategori Penilaian SAKIP	30
3.6	Realisasi capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	33
3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi Tahun 2020	34
3.8	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	38
3.9	Jumlah kematian Ibu di Provinsi Jambi 2015-2020	41
3.10	Jumlah kematian Bayi di Provinsi Jambi 2016-2020	43
3.11	Intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan di Provinsi Jambi Tahun 2020	45
3.12	Capaian Indeks Development Gender	51
3.13	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia	56
3.14	Perkembangan skor indikator IDI Tahun 2018-2020	61
3.15	Capaian TFP	64
3.16	Capaian Share Sektor Sekunder terhadap PDRB	66
3.17	Capaian Indikator Ketersediaan Energi	69
3.18	Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi	70
3.19	Kondisi ketersediaan energi	71
3.20	Capaian persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	78
3.21	Capaian Rasio Elektrifikasi	81
3.22	Potensi Geothermal Provinsi Jambi	82
3.23	Lokasi potensi air terjun di Provinsi Jambi	83
3.24	Data potensi energi air di Kabupaten Kerinci	84
3.25	Capaian sasaran Akses terhadap Air Bersih Tahun 2020	86
3.26	Capaian persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	88
3.27	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	90
3.28	Capaian Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kemiskinan	97
3.29	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi Menurut Daerah	98
3.30	Capaian Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran	101
3.31	Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk	105
3.32	Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	107

Daftar Diagram

1.1.	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2011-2020	7
3.1	Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta Komponennya	28
3.2	Perkembangan Nilai Komponen SAKIP	31
3.3	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	35
3.4	Usia Harapan Hidup Saat Lahir 2011-2020	40
3.5	Perbandingan Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Anak 11 Bulan Tahun 2020	44
3.6	Jumlah Kasus Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Jambi	45
3.7	Persentase Akreditasi Puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2020	46
3.8	Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015-2020	48
3.9	Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2020	52
3.10	Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Tahun 2019	54
3.11	Perkembangan IDI Provinsi Jambi	57
3.12	Perkembangan IDI Provinsi Jambi dengan IDI Nasional Tahun 2019	62
3.13	Ketersediaan Energi (KKal/Kap/hr)	71
3.14	Produksi Padi Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota	73
3.15	Luas Panen dan Produktivitas Padi Tahun 2020	74
3.16	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan Nasional	91
3.17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	98
3.18	Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional	99
3.19	Trend Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin	102
3.20	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020	106

Daftar Grafik

1.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Nasional	6
1.2	Laju Inflasi Provinsi Jambi (Kota)	6
3.1	Trend Perkembangan Nilai SAKIP Tahun 2017 s.d. 2020	31
3.2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi Tahun 2011 s.d. 2020	39
3.3	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Sekolah Provinsi Jambi 2011 s.d. 2020	47
3.4	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015 s.d. 2020	48
3.5	Pengeluaran Perkapita Provinsi Jambi 2015-2020	49
3.6	Perkembangan IPG Provinsi Jambi 2015-2020	52
3.7	Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi 2014-2019	54
3.8	Rata-rata Lama Sekolah Berdasar Jenis Kelamin	55
3.9	Perkembangan Indeks Aspek IDI 2009-2019	58
3.10	Demonstrasi yang terjadi Tahun 2020	62
3.11	Total Factor Productivity	65
3.12	Share Sektor Sekunder Terhadap PDRB	67
3.13	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72
3.14	Capaian Indikator Jalan Dalam Kondisi Mantap	79
3.15	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibanding Nasional	84
3.16	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan/Perdesaan	87
3.17	Capaian Indikator Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	89
3.18	Rehabilitasi Lahan dan Hutan	92
3.19	Perkembangan Jumlah Hot Spot	93
3.20	Luas Lahan dan Hutan (Ha) Tahun 2015 s.d. 2020	94
3.21	Tingkat Pengangguran Terbuka	101
3.22	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 s.d. 2020	105

Daftar Gambar

1.1.	Peta Provinsi Jambi	3
3.1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	27
3.2	Piagam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020	31
3.3	Gubernur Jambi Menerima Laporan Audit BPK 2019 Tahun 2020	32
3.4	Gubernur Jambi Menerima Penghargaan Terbaik 1 dan 3 Dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru dan Aman Covid 19 Tahun 2020	32
3.5	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020	42
3.6	Perpustakaan Keliling Pemerintah Provinsi Jambi	47
3.7	Perkembangan Indeks Variabel IDI 2018-2019	59
3.8	Pelatihan Kewirausahaan	67
3.9	Aktivitas Panen Padi Petani	73
3.10	Ruas Jalan Provinsi Jambi	79
3.11	Aktivitas Perbaikan Jalan di Provinsi Jambi	80
3.12	Sumber Energi Panas Bumi di Kabupten Kerinci	82
3.13	Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak	86
3.14	Potret Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak	87
3.15	Daerah Irigasi di Kabupaten Kerinci	88
3.16	Luas Kawasan Tertutup Pohon	92
3.17	Sebaran Hot Spot Kategori High (Conf. Rate >80%)	93
3.18	Bencana Kebakaran Hutan di Provinsi Jambi	93
3.19	Ilustrasi Kondisi Kemiskinan	97
3.20	Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Jambi	97
3.21	Pelatihan Menjahit bagi Wirausaha Baru	103



BAB I
PENDAHULUAN

The logo of the Government of Jambi is a shield-shaped emblem. It features a yellow background with a white dome and minaret in the center. Below the dome is a red and white striped banner. At the bottom of the shield is a blue and white striped banner. The entire emblem is surrounded by a yellow border. The text "BAB I" and "PENDAHULUAN" is written in a black, serif font over the emblem.



BAB I PENDAHULUAN

Bab I
1.1. Latar Belakang
1.2. Gambaran Umum Daerah
1.3. Isu Strategis

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah untuk menjamin pemerintahan telah berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2. Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 dan 58, penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Provinsi Jambi berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 Km² terdiri dari :

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)
1.	Kabupaten Kerinci	3.355,27 Km ² (6,69%)
2.	Kabupaten Merangin	7.679 Km ² (15,31%)
3.	Kabupaten Sarolangun	6.184 Km ² (12,33%)
4.	Kabupaten Batanghari	5.804 Km ² (11,57%)
5.	Kabupaten Muaro Jambi	5.326 Km ² (10,62%)
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5.445 Km ² (10,86%)
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.649,85 Km ² (9,27%)
8.	Kabupaten Tebo	6.461 Km ² (12,88%)
9.	Kabupaten Bungo	4.659 Km ² (9,29%)
10.	Kota Jambi	205,43 Km ² (0,41%)
11.	Kota Sungai Penuh	391,5 Km ² (0,78%)

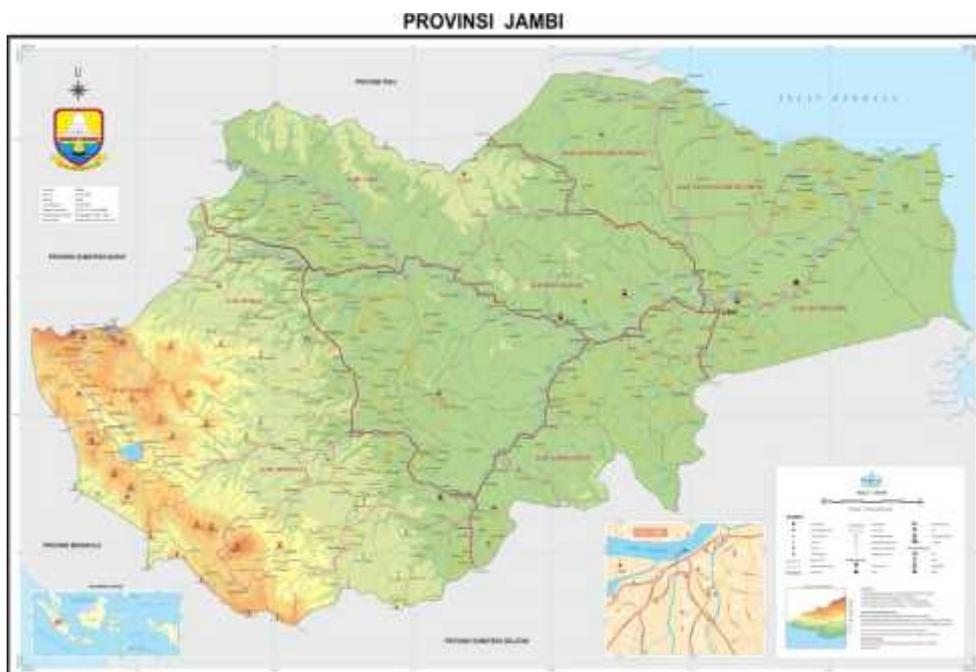
Sumber: Jambi Dalam Angka, 2020

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km².

1.2.3 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74'– 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' – 104° 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Jambi



Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

1.2.4 Topografi

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 – 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	
Jumlah	5.100.000	100	

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 mdpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 mdpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

1.2.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- 🇮🇩 Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- 🇮🇩 Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- 🇮🇩 Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- 🇮🇩 Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah :

- 🇮🇩 Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
- 🇮🇩 Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
- 🇮🇩 Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur
- 🇮🇩 Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- 🇮🇩 Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- 🇮🇩 Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

1.2.6 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Berita Resmi Statistik Tahun 2020 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.677.894 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 72,26 jiwa/km² (18,720/sq mi) dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.976,40 jiwa/km² disusul Kota Sungai Penuh sebesar 234,33 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,34 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,83 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,45 persen.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

No	Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerinci	235.800	236.782	237.791	238.700	239 606
2	Merangin	372.200	377.905	383.480	388.900	394 174
3	Sarolangun	284.200	290.231	295.985	301.900	307 585
4	Batang Hari	263.900	266.971	269.966	272.900	275 504
5	Muaro Jambi	410.340	421.179	432.305	443.400	454 524
6	Tanjab Timur	215.320	216.777	218.413	220.000	221 619
7	Tanjab Barat	316.810	322.527	328.343	333.900	339 286
8	Tebo	337.020	343.003	348.760	354.500	360 193
9	Bungo	351.880	359.590	367.182	374.800	382 311
10	Kota Jambi	583.490	591.134	598.103	604.700	611 353
11	Sungai Penuh	87,970	88.918	89.944	90.900	91 739
Provinsi Jambi		3,402,052	3.515.017	3.570.272	3.624.600	3 677 894

Sumber : BRS 2020

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51,73 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48,27 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

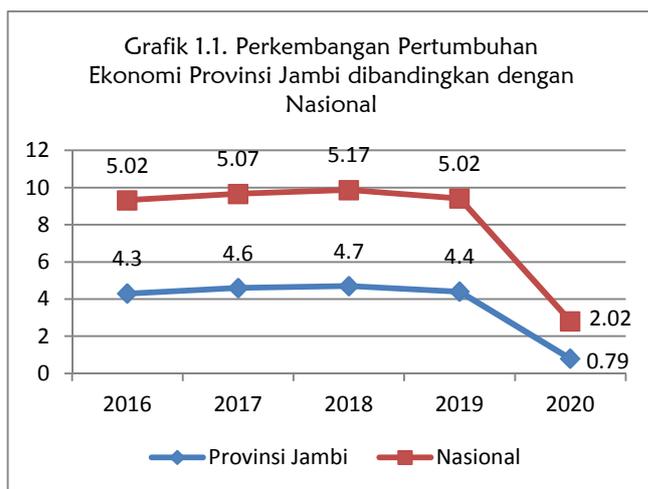
Tabel 1.4 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk
1	Kerinci	71,14
2	Merangin	50,65
3	Sarolangun	48,82
4	Batang Hari	47,02
5	Muaro Jambi	83,25
6	Tanjab Timur	40,40
7	Tanjab Barat	74,82
8	Tebo	54,87
9	Bungo	80,44
10	Kota Jambi	2.976,40
11	Sungai Penuh	234,33

Sumber : Jambi Dalam Angka 2020, 2020

1.2.7 Kondisi Ekonomi

1.2.7.1 Pertumbuhan PDRB

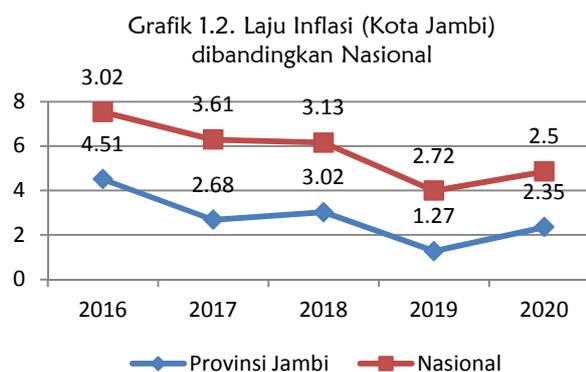


Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,79%, mengalami perlambatan dari tahun 2019 yang bertumbuh sebesar

4,4%. Pertumbuhan ekonomi ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang juga tumbuh melambat pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,02% pada tahun 2020.

1.2.7.2 Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Pada Bulan November 2020, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,44 persen.



Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebesar 105,47 dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Muara Bungo tercatat sebesar 105,35. Inflasi di Kota Jambi terjadi pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran. Sedangkan inflasi di Kota Muara Bungo terjadi pada 4 (empat) kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks.

Laju inflasi tahun kalender dan “year on year” Kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 2,35 persen dan 2,67 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan “year on year” Kota Muara Bungo bulan ini masing-masing sebesar 1,75 persen dan 2,16 persen.

1.2.7.3 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi periode Maret 2011-Maret 2020 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada periode Maret-September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan secara absolut selama periode Maret 2011-Maret 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari 272,77 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 277,80 ribu orang pada Maret 2020.

Diagram 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2011 s.d. 2020



Sumber : BRS 2020

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada Maret 2020 sebanyak 277,80 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019, maka selama enam bulan tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,4 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penambahan sebanyak 8,5 ribu orang dan daerah pedesaan turun sebesar 4,0 ribu orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 9,75 persen menjadi 10,41 persen. Sedangkan di pedesaan turun dari 6,44 persen menjadi 6,23 persen dibandingkan dengan September 2019.

Tabel 1.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020

Daerah	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (000)		
	Maret 2019	September 2019	Maret 2020	Maret 2019	September 2019	Maret 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota	9,81	9,75	10,41	115,08	115,16	123,64
Perdesaan	6,53	6,44	6,23	159,24	158,20	154,16
Kota+Perdesaan	7,60	7,51	7,58	274,32	273,37	277,80

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2019, September 2019, dan Maret 2020

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, *e- government system* belum optimal dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.

3. Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) berwawasan lingkungan belum optimal.** Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
8. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kekayaan, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
9. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.



BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

SEPUKUK JAMBI SEMPILAN LUBAH



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II
2.1. Rencana Strategis
2.1.1 Visi dan Misi
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
2.2. Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016–2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

Tertib : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminankepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

- Unggul** : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis.
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah.
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN.
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan.

7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah.
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.
7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama.
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan hukum.
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah.
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP).
11. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
12. Meningkatnya ketahanan pangan.
13. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian.
15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik.
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi.
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal.
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.
19. Menurunnya angka kemiskinan.
20. Menurunnya angka pengangguran.
21. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik	Mewujud-kan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi awal “CC”, dan target capaian akhir “B”)	Meningkat-nya transparan-si dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP
					Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan
					Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah
				Meningkat-nya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM
2	MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.	Meningkat-kan kualitas sumberdaya manusia melalui peningka-tan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (kondisi awal 68,24 dan target capaian akhir 71,8)	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
					Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
					Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)
				Meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Angka Melanjut-kan ke PT Akreditasi B
					Tingkat kelulusan SMA dan SMK
		Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis	1. Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) (kondisi awal 0,809 dan target capaian akhir 0,815)	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IDG

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
			2. Indeks kebebasan dari diskriminasi (kondisi awal 96,7 dan target capaian akhir 100)	Meningkat-nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni
				Meningkat-nya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan
3	MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat	Mewujud-kan ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (kondisi awal 70,68 dan target capaian akhir 79,0)	Meningkat-nya stabilitas tibumtranmas dan hukum	Indeks Aspek Kebebasan Sipil
				Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi
4	MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan	Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN	Nilai Daya Saing (ACI) (Kondisi awal - 0,7379 dan target capaian akhir sebesar 0,1)	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)
				Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB
		Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Petani Tanaman Pangan (Kondisi awal 105,03 dan target capaian akhir sebesar 106,0)	Meningkat-nya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)
				Meningkatnya Indeks Pertanian pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanian: - IP 200 - IP 300
5	MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkat-kan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum serta pengelolaan energi	Nilai Komponen daya saing infrastruktur dan kualitas hidup (ACI) (Kondisi awal sebesar - 0,3915 dan target akhir sebesar 0,1)	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap
					Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
				Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kondisi awal sebesar 52,72 dan target capaian akhir sebesar 66,0)	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal	<p>persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan</p> <p>Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat <i>good mining practise</i></p> <p>persentase perusahaan proper hijau</p> <p>Persentase peningkatan industri ekowisata</p> <p>Persentase pengelolaan hutan yang lestari</p>
				Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	<p>Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar</p> <p>persentase penurunan luas lahan kritis</p>
6	MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks kebahagiaan (Kondisi awal 71,1 dan target capaian akhir sebesar 72,5)	<p>Menurunnya angka kemiskinan</p> <p>Menurunnya angka pengangguran</p> <p>Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</p>	<p>Angka Kemiskinan</p> <p>Tingkat pengangguran Terbuka</p> <p>Laju Pertumbuhan Penduduk</p>

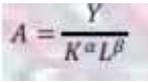
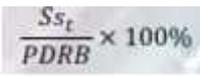
Dari indikator-indikator kinerja tersebut dipilih 15 indikator kinerja utama yang selanjutnya ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi																																													
<p>MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik</p>																																																
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan</p> <p>b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unsur Penilaian</th> <th>Nilai Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penataan Peraturan Perundang-undangan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penataan dan Penguatan organisasi</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Penguatan Akuntabilitas</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unsur Penilaian</th> <th>Nilai Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemerintah yang bersih dan bebas KKN</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">40,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metode pengukuran/penilaian adalah dengan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survey internal dan eksternal.</p>	No.	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal	1.	Manajemen Perubahan	5,0	2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0	3.	Penataan dan Penguatan organisasi	6,0	4.	Penataan Tatalaksana	5,0	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0	6.	Penguatan Akuntabilitas	6,0	7.	Penguatan Pengawasan	12,0	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0	JUMLAH		60	No.	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal	1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0	2.	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,0	3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,0	JUMLAH		40,0
No.	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal																																														
1.	Manajemen Perubahan	5,0																																														
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0																																														
3.	Penataan dan Penguatan organisasi	6,0																																														
4.	Penataan Tatalaksana	5,0																																														
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0																																														
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,0																																														
7.	Penguatan Pengawasan	12,0																																														
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0																																														
JUMLAH		60																																														
No.	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal																																														
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,0																																														
2.	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,0																																														
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,0																																														
JUMLAH		40,0																																														

<p>MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender</p>			
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.</p> $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>dimana :</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$(indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak</p>
3	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $IDG = \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})}{3}$ <p>Dimana: I_{par} = Indeks Keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan $I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan</p>
<p>MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat</p>			
4	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	<p>Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain.</p> <p>Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni : Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); Wawancara Mendalam (<i>in-depth interview</i>).</p> <p>Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP).</p> <p>Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek.</p>

No	SasaranStrategis	IKU	Formulasi
			<p>Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni :</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>Indeks (X_{ijk}) = Di mana:</p> <p>X_{ijk} : Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k. K_{ideal} : Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}.</p> <p>$X_{terburuk}$: Tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks.</p> <p>Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi.</p> <p>Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{ideal} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} > 0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni :</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk}) \times 100\% \pm 10$ <p>Di mana :</p> <p>$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam. Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing- masing variabel.</p> <p>Indeks variabel merupakan rata- rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut :</p> $I(V_{ij}) = \sum = 1 P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana : $I(V_{ik})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>P_{ijk} : Nilai penimbang dari AHP untuk indikator kompopnen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i.</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
			<p>(X_{ijk}) : Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke I setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut :</p> $I(A_i) = \sum P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(A_i)$: Indeks aspek ke i.</p> <p>P_{ij} : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p>
<p>MISI 4: Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p>			
5	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	 <p>Dengan</p> <p>A = Total Factor Productivity</p> <p>Y = total produksi (output yang dihasilkan)</p> <p>K = input kapital</p> <p>L = input tenaga kerja</p> <p>, = konstanta (elastisitas input) dari kapital dan tenaga kerja</p>
6	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	 <p>dengan :</p> <p>S_{st} = besarnya <i>share</i> sektor sekunder terhadap PDRB pada tahun t</p> <p>PDRB = Total PDRB pada tahun t</p>
7	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	$KSP_e = \frac{KTSP}{(P \times 365 \text{ hari}) \times Kand.e}$ <p>Dimana:</p> <p>KSP_e = Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)</p> <p>KTSP = Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun)</p> <p>P = Jumlah Penduduk (jiwa)</p> <p>Kand. e = Kandungan energi</p>

MISI 5: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan			
No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
8	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	<p>Jalan Prov. Dalam kondisi mantap =</p> $\frac{J_{baik} + J_{sedang}}{J} \times 100\%$ <p>Dimana: J_{baik} = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi baik (km) J_{sedang} = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi sedang (km) J = Total panjang jalan kewenangan Provinsi</p>
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	$Rasio\ Elektrifikasi = \frac{\sum RT_L}{\sum RT} \times 100\%$ <p>RT_L = Jumlah rumah tangga dengan listrik RT = Jumlah rumah tangga</p>
10	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	<p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumu :</p> $P\ AML = \frac{JRTML}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan: $P\ AML$: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. $JRTML$: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak). $JRTS$: Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p>
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$= \frac{J_{baik}}{JI} \times 100\%$ <p>J_{baik} = panjang jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (km) JI = total panjang jaringan irigasi provinsi (km)</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH\ Prov = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan: IKLH Prov = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi IKA = Indeks Kualitas Air Prov IKU = Indeks Kualitas Udara Prov IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Dimana:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$ <p>Keterangan: PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/L_{ij}, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$ <p>Keterangan : I_{EU} = Standar kualitas udara berdasarkan EU Directives, dimana I_{EU} > 1 berarti kualitas udara melebihi standar EU dan sebaliknya</p> $IKTL = 0,23\ ITH + 0,24\ IPH + 0,30\ IKT + 0,15\ IKBA + 0,08\ IKH$ <p>Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan ITH = Indeks Tutupan Lahan IPH = Indeks <i>Performance</i> Hutan IKT = Indeks Kondisi Tutupan Hutan IKBA = Indeks Konservasi Badan Air IKH = Indeks Kondisi Habitat</p>
<p>MISI 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat</p>			
12	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dengan: P₀ = Persentase penduduk miskin (head count index) Z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y_i < z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk</p>

No.	Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
13.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Keterangan: r = laju pertumbuhan penduduk P_t = jumlah penduduk pada tahun t P₀ = jumlah penduduk pada tahun dasar t = jangka waktu</p>

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	66,01
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	77
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,4
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	21,50%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.215
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	95%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	75%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	84%
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65
12.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,57%
13.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3%
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,91%



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

SEPUK JANGI SEMBILAN LURAH





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III
3.1. Capaian Kinerja
3.1.1 Capaian IKU
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2. Realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Povinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - ≥ 100	Sangat Tinggi	
2	76 – 90	Tinggi	
3	66 – 75	Sedang	
4	51 – 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2020 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2020

No.	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	100%	B	100
2.	Indeks Pembangunan Manusia	68,24	71,5	71,29	99,71	71,8	99,29
3.	IDG	61,93	66,01	88,44	133,98	67,01	131,98
4.	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68	77	69,76	90,60	79	88,30
5.	Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,4	4,09	292,14	1,5	272,67
6.	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38	21,50	18,99	88,33	22,00	80,91
7.	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.125	3.005	93,47	3.217	93,41

Laporan Kinerja Tahun 2020

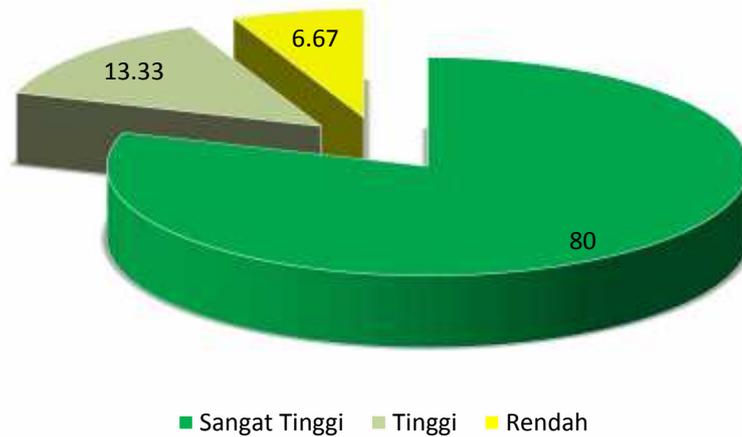
Pemerintah Provinsi Jambi

No.	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
8.	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	75,56%	78,93%	76,51%	96,93	79,54%	96,19
9.	Rasio Elektrifikasi	81,5	95%	99,90	105,16	96	104,06
10.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75%	75%	70,71%	94,28%	80%	88,39
11.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35	84	76,89	91,54	91	84,49
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	65%	68,06%	104,71	66	103,12
13.	Angka Kemiskinan	9,12%	7,57%	7,58%	99,86	7,4	102,43
14.	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%	3%	5,13%	58,47%	2,80%	54,58
15.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	1,91%	1,34%	142,53	1,82	135,82

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 12 indikator (80%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator (13,33%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (6,67%) terealisasi rendah. Sehingga bila dihitung rata-rata keseluruhan IKU telah tercapai 93,33% dari target tahun 2020 dan berbanding sama dengan target akhir RPJMD atau masuk dalam kriteria capaian tinggi.

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2020 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020



3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Sasaran 1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

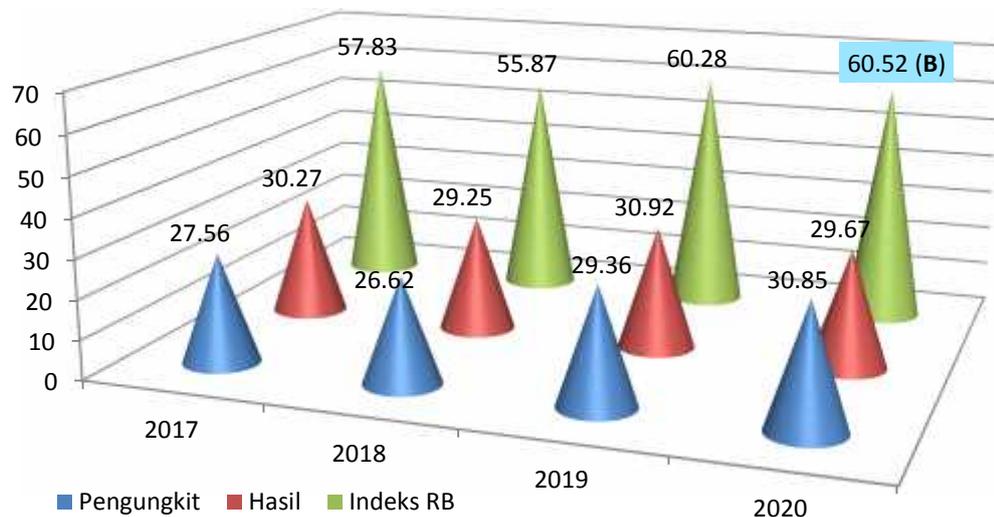
Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	B	B	100	B

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

Diagram 3.1 Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta komponen pengungkit dan komponen hasilnya.



Sumber: Kemenpan RB, 2020

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020 adalah 60,52 dengan kategori B. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20,00	12,07
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,95
3.	Reform	30,00	12,83
	Total Komponen pengungkit (A)	60,00	30,85
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,29
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,98
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,40
	Total komponen hasil (B)	40,00	29,67
	Indeks reformasi birokrasi (A+B)	100,00	60,52

Sumber: KemenPANRB, 2020

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pengelolaan kearsipan dapat dilihat hasilnya dari hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 68,99.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai yang baik dan masuk dalam Zona Hijau dengan raihan nilai 95,15 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia. Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat peningkatan jumlah unit yang diajukan oleh Provinsi Jambi serta maturitas SPIP berada pada level 3.

Dalam rangka peningkatan nilai penataan organisasi/kelembagaan adalah penataan struktur organisasi dan tata laksana terus disempurnakan setiap tahun untuk mencapai struktur ideal yang diinginkan. Dalam rangka penguatan komponen penataan Ketatalaksanaan, telah disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jambi serta Perangkat Daerah dan selanjutnya dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur pada seluruh perangkat daerah Provinsi Jambi.

Sementara itu, pada komponen penguatan akuntabilitas, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan beberapa perbaikan pada seluruh komponen SAKIP, diantaranya melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) Pemerintah Provinsi Jambi serta Perangkat Daerah, menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan SKP Online berbasis kinerja dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Tabel 3.5 Kategori Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang

Sumber: Perpres Nomor 29 Tahun 2014

Perbaikan komponen akuntabilitas kinerja menghasilkan capaian yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari 60,02 pada tahun 2018 menjadi 61,35 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mendapat nilai 62,32 dengan predikat B. Bila dibandingkan dengan target, dimana target pada tahun 2020 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2020 ini mencapai 89,01% atau masuk dalam kategori tinggi. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian.

Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020



Perkembangan capaian nilai SAKIP dan nilai komponen SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1 Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2017-2020

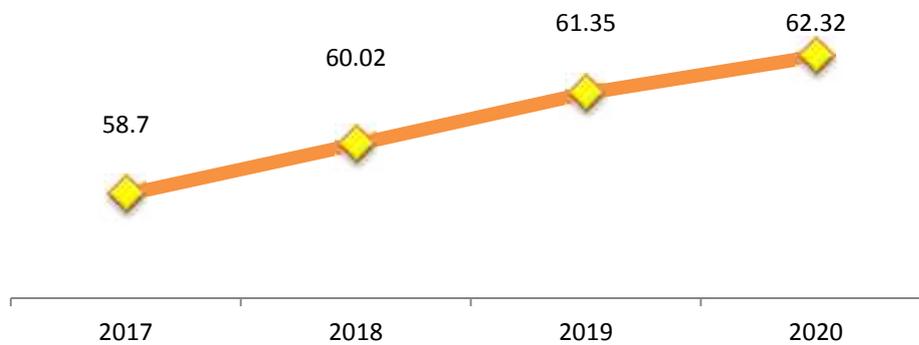


Diagram 3.2 Perkembangan Nilai Komponen SAKIP



Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2020. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2020 masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.6 Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Gambar 3.4 Gubernur Jambi Menerima Penghargaan Terbaik 1 dan 3 Dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru dan Aman Covid 19



Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

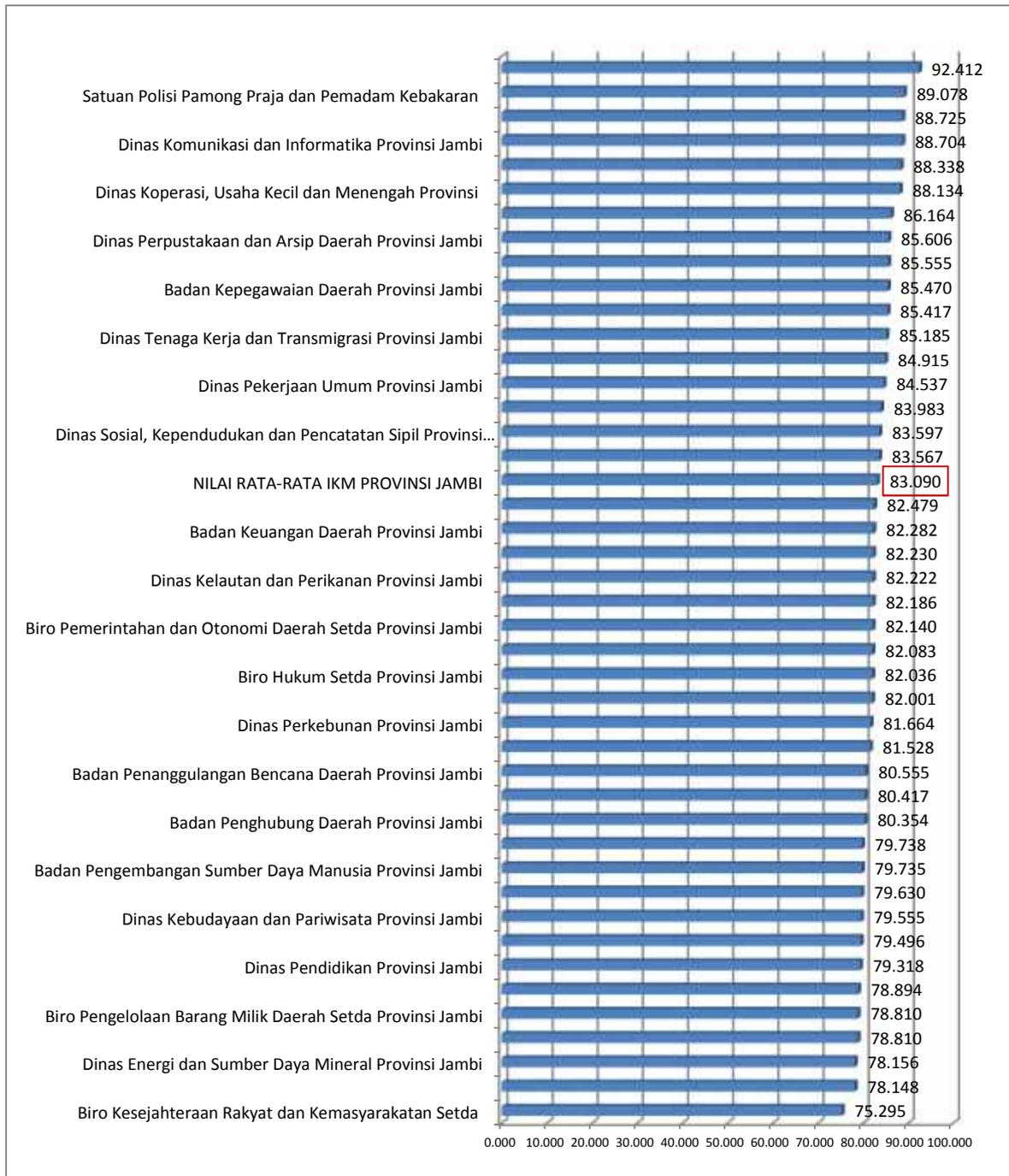
Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Tabel 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020

Unsur Pelayanan	2017	2018	2019	2020
U1: Persyaratan pelayanan	78,07	81,713	83,862	84,296
U2: Prosedur pelayanan	78,14	81,390	82,776	83,877
U3: Waktu pelayanan	76,53	78,860	81,326	81,741
U4: Biaya/tarif pelayanan	78,88	82,229	83,006	85,226
U5: Produk/hasil pelayanan	78,11	79,931	81,742	82,759
U6: Kemampuan petugas pelayanan	80,43	80,763	82,070	82,665
U7: Perilaku petugas pelayanan	81,03	81,858	82,480	83,057
U8: Maklumat pelayanan	76,77	78,916	80,961	81,740
U9: Mekanisme pengaduan pelayanan	75,75	79,775	80,382	82,451
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,19	80,604	82,063	83,090

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2020

Diagram 3.3 Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2020

Pada tahun 2020, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019 adalah “B” atau “Baik” dengan nilai rata-rata **83,090**.

Hal ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh unsur pelayanan. Unsur dengan nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan dan terendah adalah penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
4. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi
6. Program penataan batas dan wilayah administrasi
7. Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip
8. Program Pengembangan kearsipan
9. Program Profesionalisasi PNS
10. Program Manajemen pelayanan kediklatan
11. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
12. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
13. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program penelitian dan pengembangan
16. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi
17. Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi
18. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
20. Program pembangunan, pengembangan aplikasi dan telematika
21. Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
22. Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca
23. Program Reformasi Birokrasi
24. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah
- e. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas



Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Demikian pula pendidikan, sebagai salah satu hak asasi manusia maka setiap warga negara berhak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun



gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.

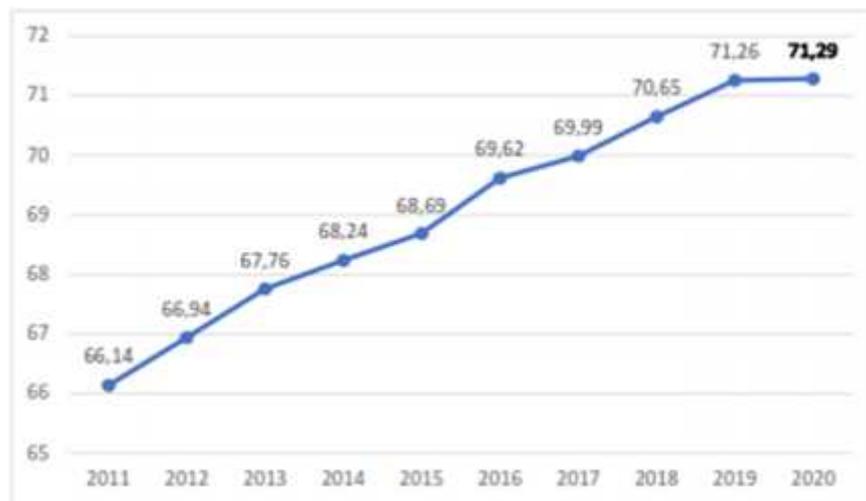
Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 71,29 atau melebihi target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 71,5.

Tabel 3-8 capaian IPM sebagai indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
IPM	68,24	71,5	71,29	99,71	71,8

Bila melihat capaian IPM Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Data yang dirilis tahun 2020 menunjukkan peningkatan IPM sebesar 0,03 dari tahun sebelumnya, yaitu dari 71,26 menjadi 71,29 atau meningkat 0,03%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2020 yaitu 71,5 atau terealisasi sebesar 99,71%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan tahun 2020 kinerja indikator IPM telah tercapai sebesar 99,29%.

Grafik 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2011-2020



IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (*UHH*) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2020. IPM Provinsi Jambi meningkat dari 66,14 pada tahun 2011 menjadi 71,29 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun.

Kurun waktu 2011 hingga 2020 IPM Provinsi Jambi menunjukkan kemajuan yang besar. Pada tahun 2018 IPM Provinsi Jambi telah menembus angka 70 poin yang berarti meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menjadikan kebanggaan tersendiri dimana bisa dikatakan IPM Provinsi Jambi telah “naik kelas”. Pada periode 2019-2020, IPM Provinsi Jambi tumbuh 0,04 persen.

Pertumbuhan pada periode tersebut lebih lambat apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2018-2019, yang tumbuh sebesar 0,86 persen. Melambatnya pertumbuhan IPM pada tahun 2020 disebabkan oleh tekanan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada indeks pengeluaran akibat pandemi Covid-19.

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2011-2020

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan nilai komponennya. Seiring dengan tumbuhnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun.

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2020, Provinsi Jambi telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,12 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Jambi hanya sebesar 70,04 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 71,16 tahun.

Diagram 3.4 Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi, 2011-2020



Sumber: BPS, 2020

Tingkat keberhasilan peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. atau angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab-sebab lain.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan SDKI tahun 2012, AKI Provinsi Jambi adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka ini mengalami perbaikan yang signifikan pada data Supas Tahun 2015 dan SDKI 2015, dimana AKI menurun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup atau telah terjadi peningkatan kinerja penurunan AKI sebesar 15,04 persen. Untuk mengetahui data tahunan, maka yang digunakan adalah jumlah kematian ibu.

Tabel 3.9 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

No.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kerinci	6	6	4	5	4	8
2.	Merangin	10	6	5	5	9	5
3.	Sarolangun	3	5	4	4	4	5
4.	Batang Hari	4	2	8	3	7	8
5.	Bungo	8	1	5	1	9	1
6.	Tebo	2	9	4	3	10	6
7.	Muaro Jambi	6	3	5	2	4	2
8.	Tanjab Barat	3	5	7	4	5	12
9.	Tanjab Timur	5	8	6	4	2	3
10.	Kota Jambi	7	3	4	2	5	11
11.	Kota Sei Penuh	2	2	2	2	0	0
Provinsi		56	59	54	46	59	61

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2020

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2020. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2020, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebanyak 61 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 12 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan 0 kasus. Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.

Gambar 3.5 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2020

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2020, jenis terbanyak adalah perdarahan dan hipertensi. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga.

Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi yang digunakan adalah data SDKI yang dirilis setiap 5 tahun sekali, dan data terakhir yang dirilis adalah hasil SDKI 2017 yang baru saja dirilis. Berdasarkan data SDKI 2017, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan AKB di Provinsi Jambi dari 34 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan ini cukup menggembirakan dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka tersebut.

Tabel 3.10 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kerinci	43	42	42	49	34
2.	Merangin	25	35	35	32	25
3.	Sarolangun	22	21	21	23	35
4.	Batang Hari	19	25	25	29	36
5.	Bungo	15	12	12	21	20
6.	Tebo	16	11	11	13	29
7.	Muaro Jambi	13	35	35	33	19
8.	Tanjab Barat	44	38	38	52	31
9.	Tanjab Timur	10	32	32	26	16
10.	Kota Jambi	12	4	4	8	19
11.	Kota Sei Penuh	20	6	6	4	0
Provinsi		273	239	261	290	264

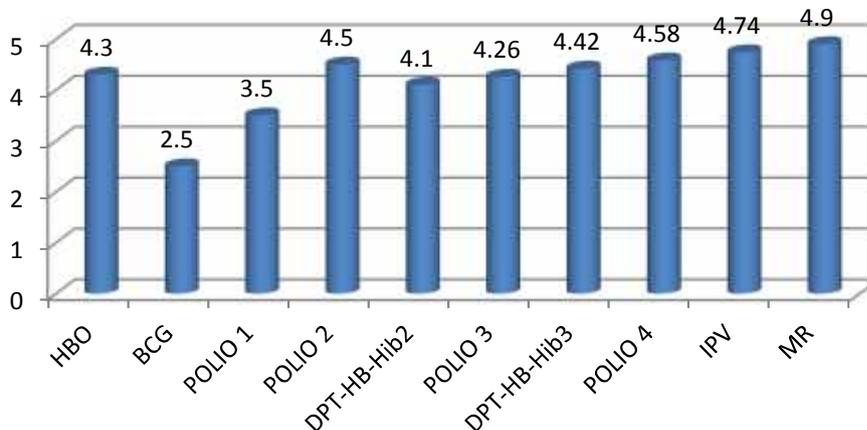
Pada tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2020 jumlah kematian bayi sebanyak 264 orang tertinggi terdapat terdapat pada kabupaten Batanghari 36 orang dan kabupaten sarolangun 35 orang, kabupaten kerinci 34 orang.

Dilihat dari jumlah kematian neonatal 0-6 hari meninggal 235 orang bayi dengan penyebab kematian adalah BBLR dan asfiksia. Pada bayi yang berumur 7-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 48 orang sedangkan yang berumur 0-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 283 orang dengan penyebab BBLR 120 orang (42,40%) dan asfiksia sebesar 91 orang (32,15%).

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONEC (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketinggian desa/kelurahan (UCI Desa).

Diagram 3.5 Perbandingan persentase cakupan imunisasi rutin anak 11 bulan tahun 2020 dibanding target (93%)



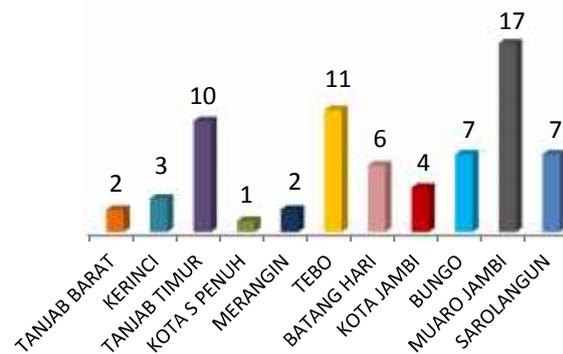
Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi pendek pada balita mencapai 37,9 persen. Setelah dilaksanakan upaya-upaya penurunan prevalensi tersebut, maka telah terjadi penurunan terhadap Prevalensi pendek pada anak balita menjadi 30,7 persen pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini membuktikan bahwa telah berhasil menurunkan prevalensi sebesar 19 persen dalam kurun 5 tahun tersebut.

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi berdasarkan by name by address, jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi sebanyak 70 kasus, kasus terbanyak di Kab. Muaro jambi sebesar 17 kasus, Kab. Tebo sebesar 11 kasus dan Kab. Batanghari sebesar 6 kasus, kasus gizi buruk meninggal ada di Kab. Muaro jambi 1 orang, kab. Sarolangun 1 orang dan kab. Tanjab Barat 1 orang.

Diagram 3.6 Jumlah Kasus Gizi buruk pada Balita di Provinsi Jambi



Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, Dinkes, 2020

Kab/Kota yang mengirimkan kasus gizi buruk lebih banyak hal ini disebabkan karena survailans pelacakan kasus gizi buruk berjalan dengan baik, semakin banyak penemuan kasus harapan kita semakin banyak anak yang bisa di intervensi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memberikan bantuan makanan pangan lokus untuk anak gizi buruk sebanyak 5 kasus dengan hari makan sebanyak 90 hari @ Rp. 20.000,- sehari makan

Tabel 3.11 Intervensi Gizi Spesifik yang dilaksanakan di Provinsi Jambi Tahun 2020

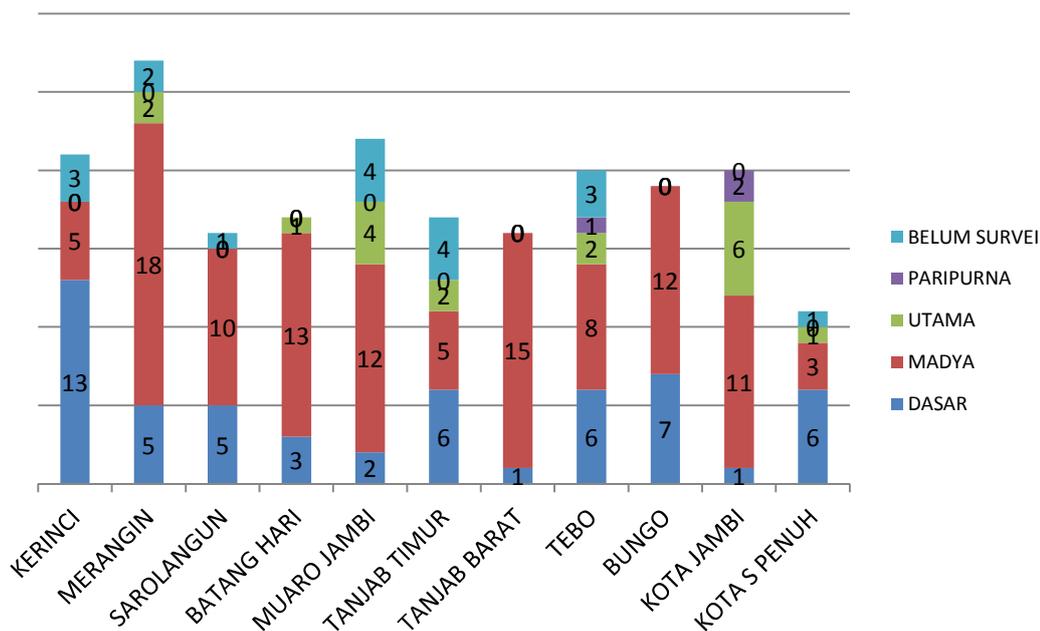
No	KABUPATEN / KOTA	INDIKATOR GIZI								
		Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT			Persentase Balita Kurus yang mendapat PMT			Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah 90 tablet selama		
		Sasaran	Absolut	%	Sasaran	Absolut	%	Sasaran	Absolut	%
1	KERINCI	483	483	100	1.285	1.285	100	4.209	3.638	86,4
2	KOTA S.PENUH	85	85	100	10	10	100	1.615	1.584	98,1
3	MERANGIN	1.057	889	84,1	2.693	2.069	76,8	8.017	7.227	90,1
4	SAROLANGUN	361	361	100	680	680	100	7.084	6.482	91,5
5	BATANG HARI	484	484	100	3.230	3.230	100	5.689	5.456	95,9
6	MUARO JAMBI	333	309	92,8	149	149	100	10.825	10.120	93,5
7	TANJAB TIMUR	286	276	96,5	673	673	100	4.264	3.507	82,2
8	TANJAB BARAT	647	632	97,7	721	697	96,7	7.096	6.678	94,1
9	TEBO	1.452	1.054	72,6	734	734	100	7.404	6.620	89,4
10	BUNGO	49	49	100	3	3	100	8.736	7.682	87,9
11	KOTA JAMBI	752	689	91,6	269	257	95,5	11.613	11.085	95,5
	PROVINSI	5.989	5.311	88,7	10.447	9.787	93,7	76.552	70.079	91,5

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Data diolah, 2020

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Bentuk intervensi yang diberikan antara lain adalah pemberian suplemen kepada ibu hamil, pemberian asi eksklusif, pemanataan pertumbuhan bayi dan balita serta pemberian suplemen vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun. Khusus pada balita yang tergolong kurus, semua atau 100% telah mendapat makanan tambahan di provinsi Jambi pada tahun 2020.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan secara umum di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong kabupaten/ kota untuk memiliki puskesmas terakreditasi. Dari 206 puskesmas yang ada, sampai dengan tahun 2020 telah terakreditasi 188 pukesmas dengan sebagian besar klasifikasi akreditasinya adalah Madya sebanyak 112 puskesmas (59,5%), dan Dasar sebanyak 55 Puskesmas (29,2%). Selanjutnya klasifikasi utama sebanyak 18 puskesmas (9,5%), dan klasifikasi paripurna 3 puskesmas (1,5%). Puskesmas dengan klasifikasi Paripurna terdapat di Kota Jambi sebanyak 2 Puskesmas, Kabupaten Tebo sebanyak 1 Puskesmas.

Diagram 3.7 Persentase akreditasi puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2020



B. Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan taraf kehidupan, sudah selayaknya masyarakat mengedepankan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan. Pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah proses belajar mengajar agar peserta didik menjadi aktif dan berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,38 tahun sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 1,07 tahun.

Gambar 3.6 Perpustakaan Keliling Provinsi Jambi



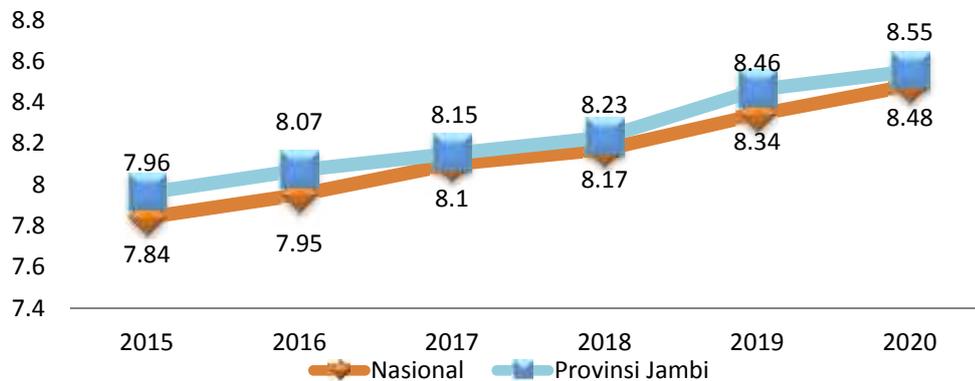
Grafik 3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi, 2011-2020



Selama periode 2011 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,36 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan ditempuh oleh penduduk Jambi. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Jambi telah mencapai 12,98 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan Diploma 1.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tumbuh 1,54 persen per tahun selama periode 2011 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Jambi yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Provinsi Jambi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 8,55 tahun atau hingga kelas IX (SMP kelas III).

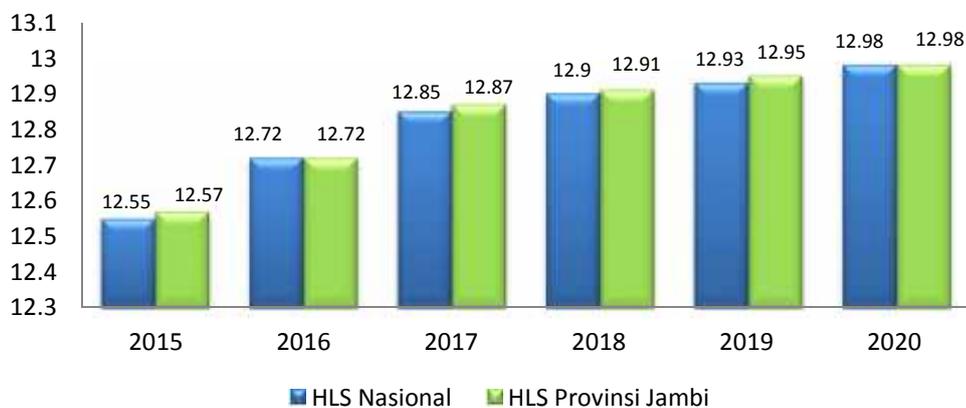
Grafik 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2020



Kesempatan seluas-luasnya telah diberikan kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan berbagai upaya, pemerintah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2020 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan antara lain adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 161 Sekolah Menengah Atas, 104 Sekolah Menengah Kejuruan dan 13 sekolah luar biasa.

Selain RLS, indikator dimensi pengetahuan dalam IPM lainnya adalah Harapan Lama Sekolah atau HLS. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Pada rentang 2015-2017 capaian HLS Provinsi Jambi selalu lebih tinggi dari nasional, namun dua tahun terakhir peningkatan HLS nasional lebih cepat dari Provinsi Jambi walaupun dengan selisih yang sangat kecil. Pada tahun 2019, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,93 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018 yang lalu.

Diagram 3.8 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2020

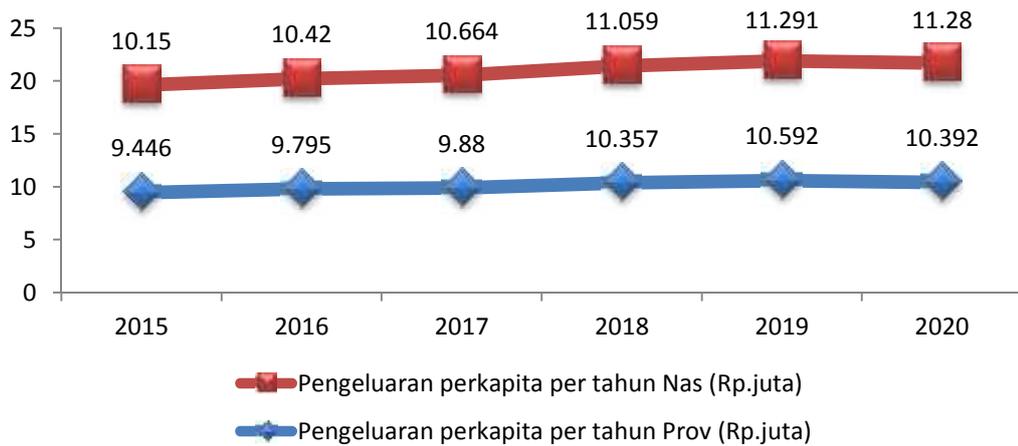


Sumber : BPS, 2020

C. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Jambi mencapai Rp 10,392 juta per tahun. Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan, terakhir pada tahun 2020 berfluktuasi dan mengalami penurunan sebesar 0,98 persen.

Grafik 3.5 Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2020

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan ketiga dimensi di atas. Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
5. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
6. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
7. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
16. Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda

17. Program Kesehatan Ibu dan Anak
18. Program kesehatan anak balita
19. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20. Program Pendidikan SMA
21. Program Pendidikan SMK
22. Program BOS
23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Permasalahan :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.



Sasaran 3

Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang capaiannya pada tahun 2019 (kondisi tahun 2018) adalah sebesar 67,78.

Tabel 3.12 Capaian IDG sebagai indikator sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

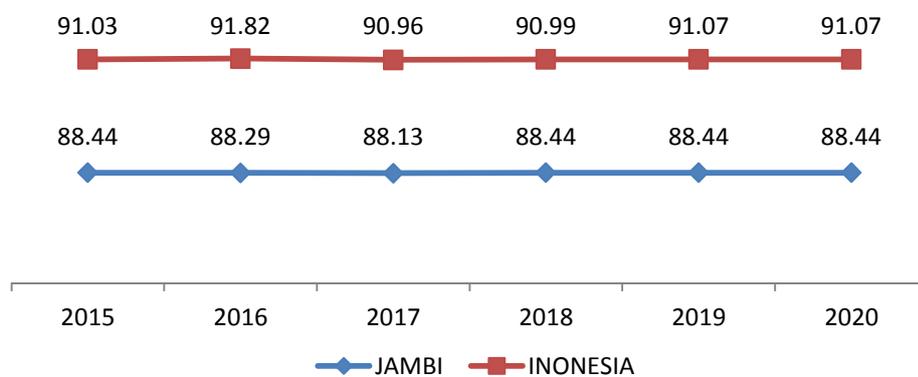
Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,93	66,01	67,78	102,68	67,01

Sumber: BPS, DP3AP2, 2020

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM.

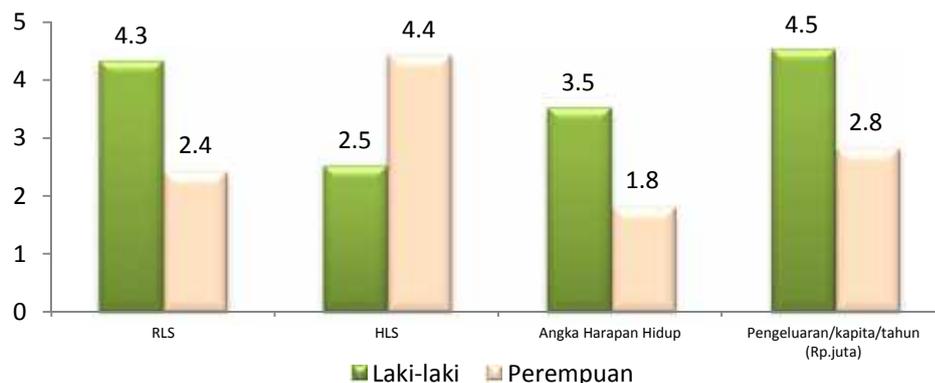
Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Grafik 3.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2020

Diagram 3.9 Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2020



Sumber: BPS, 2020

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi



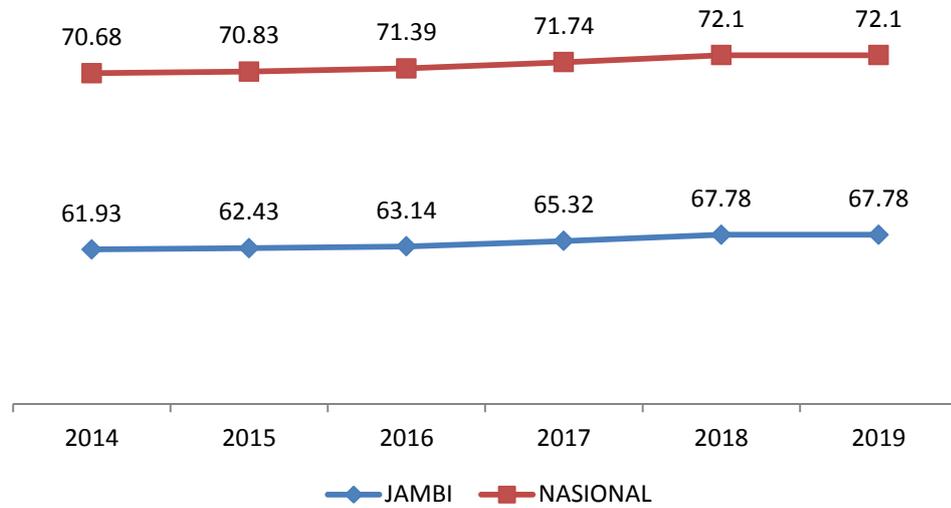
perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2020 (kondisi Tahun 2019) adalah 67,78 atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 102,68% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 98,86.

Capaian IDG Provinsi Jambi tersebut, masih berada di bawah capaian nasional dengan tren meningkat lebih cepat dari nasional. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokkan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan.

Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Namun pada komponen perempuan sebagai tenaga profesional terlihat bahwa persentase perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan di Provinsi Jambi sudah diperhitungkan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesionalitas.

Grafik 3.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun 2014-2019



Sumber: BPS, 2020

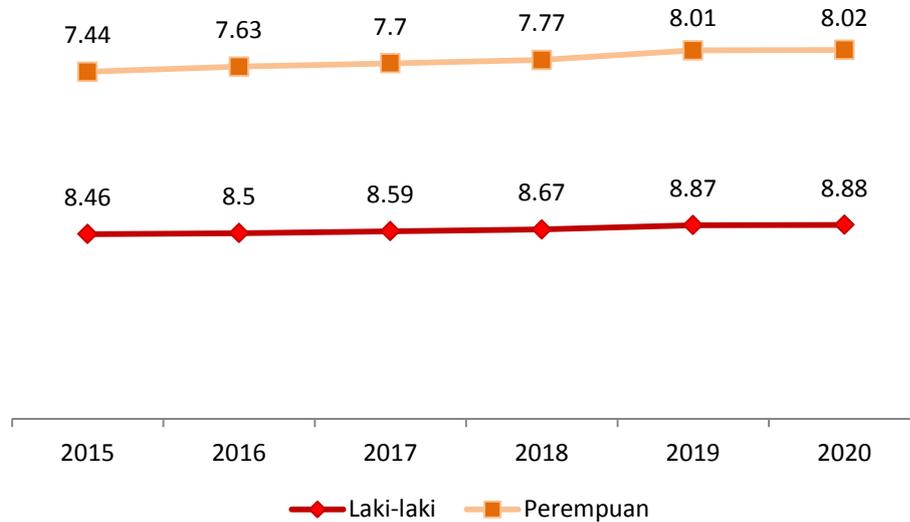
Diagram 3.10 Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Jambi Tahun 2019



Sumber: BPS, 2020

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2020, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 3.8 Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi



Sumber: Jambi Dalam Angka 2020, 2020

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, dan rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.

Solusi :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.



Sasaran 4

Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif dengan menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik, dan lain-lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, dengan capaian tahun 2020 sebagaimana tergambar di bawah ini.

Tabel 3.13 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi sebagai indikator Sasaran terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi	70,68	77	69,76	90,60	79

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dihitung dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik dilihat dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan aspek lembaga demokrasi dilihat dari Pemilu, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan peran peradilan yang independen.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2019

IDI Provinsi Jambi tahun 2019 mencapai **69,76** dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2018 yang capaiannya sebesar 68,71. Perubahan angka tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Jambi masih termasuk dalam kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 71,00.

Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2013 sebesar 64,41; dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 74,12. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Diagram 3.11 Perkembangan IDI Provinsi Jambi



Sumber: BPS Provinsi Jambi 2020

2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI

Angka IDI 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 76,67; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 64,63; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 69,21. Pada tahun 2019, aspek Lembaga Demokrasi menjadi satu-satunya aspek yang mengalami penurunan dan menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang semakin menurun. Sementara itu, meskipun capaiannya masih menjadi yang terendah di antara aspek lainnya, aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan dan menunjukkan kecenderungan (*trend*) yang semakin meningkat.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan masing-masing 3,79 poin dan 1,87 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 3,71 poin. Meskipun mengalami penurunan, Aspek Lembaga Demokrasi masih termasuk kategori “sedang”, sama halnya untuk kedua aspek lainnya, yaitu aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik juga masih berkategori “Sedang”.

Grafik 3.9 Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2009-2019



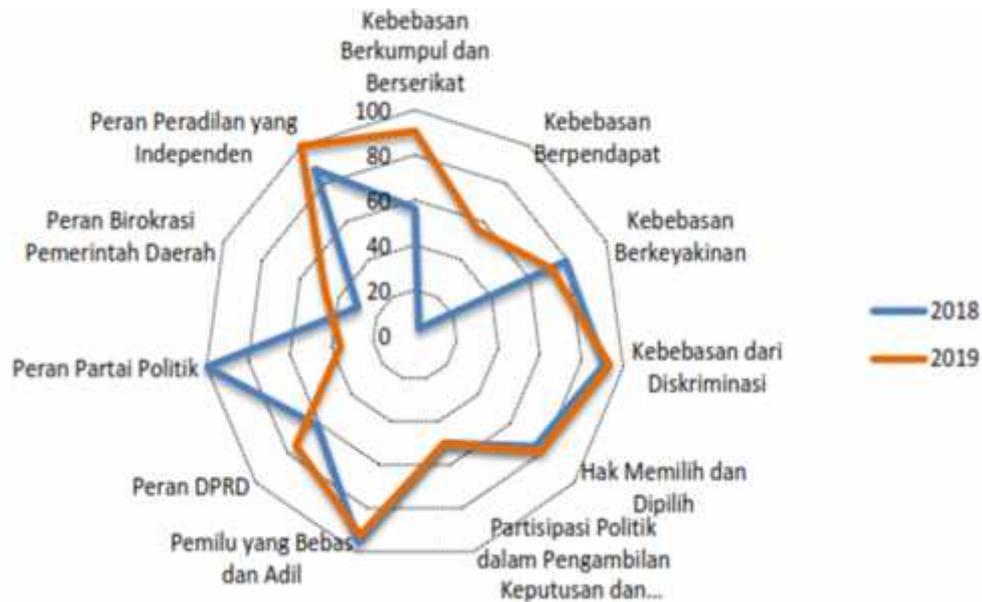
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2020

3. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2019 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks, tujuh variabel yang mengalami peningkatan, dan satu variabel tidak mengalami perubahan. Dari tiga variabel yang mengalami penurunan, satu diantaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran Partai Politik menurun paling tajam yaitu sebesar 64,29 poin dari 100 pada 2018 menjadi 35,71 pada 2019. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan Berkeyakinan dari 78,96 pada 2018 menjadi 71,16 pada 2019 atau turun 7,80 poin. Selanjutnya variabel Pemilu yang Bebas dan Adil turun sebesar 3,02 poin dari 95,57 pada 2018 menjadi 92,55 pada 2019.

Di sisi lain, variabel Kebebasan Berpendapat meningkat secara bermakna sebesar 52,06 poin, dari 3,47 pada 2018 menjadi 55,53 pada 2019. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat meningkat sebesar 34,38 poin dari 56,25 pada 2018 menjadi 90,63 pada 2019, variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat 17,18 poin dari 29,78 pada 2018 menjadi 46,96 pada 2019, variabel Peran DPRD meningkat 13,60 poin dari 61,27 menjadi 74,87 pada 2019, variabel Peran Peradilan yang Independen mengalami kenaikan sebesar 12,50 poin dari 87,50 menjadi 100 pada 2019, dan variabel Hak Memilih dan Dipilih naik 3,74 poin dari 75,52 menjadi 79,26 pada 2019, serta variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang mengalami kenaikan 2,61 poin dari sebelumnya 90,86 menjadi 93,47.

Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2018-2019



4. Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI 2019, dari 28 indikator terdapat 15 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi :

- a. Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- c. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok,
- d. Indikator 9, Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok,
- e. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok,
- f. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,
- g. Indikator 12, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih,
- h. Indikator 14, Partisipasi penduduk dalam pemilu (*voters turnout*),
- i. Indikator 17, Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- j. Indikator 18, Netralitas penyelenggara pemilu,
- k. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- l. Indikator 20, Alokasi pendidikan dan kesehatan,
- m. Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik, dan
- n. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial.
- o. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Terdapat 4 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60-80) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 3, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- b. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- c. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan,
- d. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

Meskipun demikian, masih terdapat 9 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- a. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- c. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- d. Indikator 7, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama,
- e. Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi,
- f. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan,
- g. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif,
- h. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu,
- i. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,

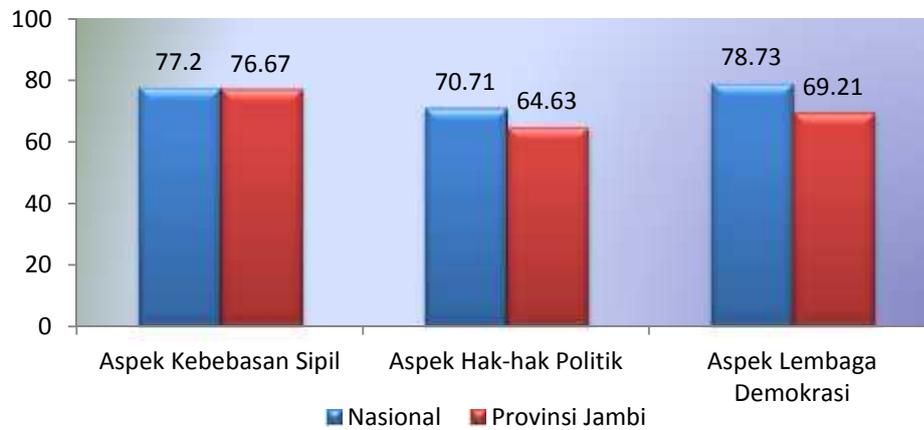
Perkembangan skor indikator IDI 2018-2019 sebagaimana dirilis BRS Provinsi Jambi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14 Perkembangan Skor Indikator, 2018-2019

No	Nama Indikator	2018	2019
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	50,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	25,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	4,17	66,67
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	78,26	82,61
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	50,00	25,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	100,00	55,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,33	83,33
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	90,63	100,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	98,08
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	95,76
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	72,37	74,14
14	Voters turnout	77,25	85,14
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	56,60	48,50
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	86,36
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	91,14	98,73
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	91,97	94,58
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0,00	76,20
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	3,57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	28,57
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	55,26	63,16
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	8,33	33,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	75,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

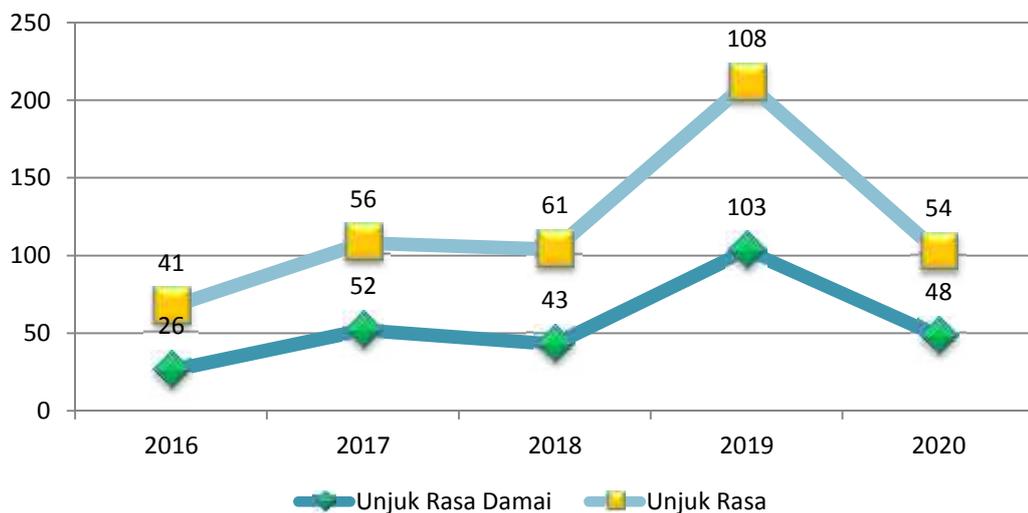
Sumber : BRS Provinsi Jambi 2020

Diagram 3.12 Perkembangan IDI Provinsi Jambi dibandingkan dengan IDI Nasional Tahun 2019



Aspek kebebasan sipil ditunjang oleh aksi demonstrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa mengalami penurunan dan pada tahun 2020 terjadi 54 kali unjuk rasa dengan 6 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 11,1 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan.

Grafik 3.10 Demonstrasi yang terjadi tahun 2020



Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2020

Adapun program pendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi ketertiban dan keamanan

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak criminal
5. Program advokasi hukum dan HAM
6. Program dokumentasi dan informasi produk hukum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program perwujudan demokrasi makin kokoh
9. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Permasalahan :

Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi antara lain : faktor ideology, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosian budaya.

Beberapa permasalahan yang seringkali dialami dalam pengelolaan aksi demonstrasi diantaranya :

- a. Kemampuan manajerial
- b. Pengalaman aparaturnya dalam mengelola aksi
- c. Kemampuan deteksi dini yang minim
- d. Kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki
- e. Ada tidaknya dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian dan TNI
- f. Kondisi physis para pendemo termasuk banyaknya jumlah serta lamanya aksi yang dilakukan
- g. cepat atau lambatnya penerimaan aspirasi oleh pejabat yang berwenang.

Solusi :

Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan.

Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan profesionalitas aparaturnya dalam menangani aksi demonstrasi
- b. Pengembangan sistem antisipasi dini
- c. Menerapkan manajemen konflik dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo, serta
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri dan TNI.

Sasaran 5

**Meningkatnya
Total factor Productivity (TFP)**



Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity* (TFP). Penggunaan *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan karena TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.15 Capaian Total Factor Productivity sebagai indikator Sasaran Meningkatkan Total Factor Productivity (TFP)

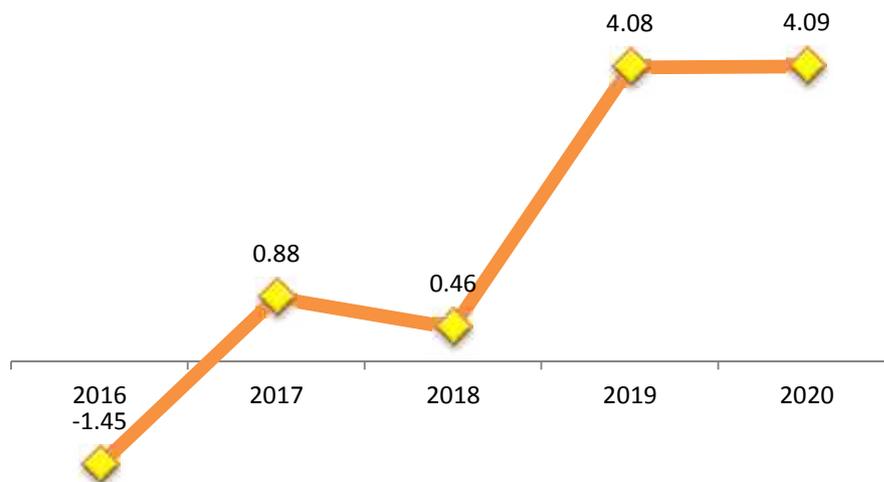
Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,4	4.09	292,14	1,5

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan Total Factor Productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi ”pesan” penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.

Grafik 3.11 Total Factor Productivity (TFP) Provinsi Jambi



Sumber: hasil analisis 2020

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 4,09 atau terealisasi 292,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,4 dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Salah satu kontributor pertumbuhan TFP adalah teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam baik pertambangan, migas maupun sumber daya perkebunan. Selain itu pertumbuhan pengguna telepon selular dan dampak industri 4.0 turut memberikan andil dalam pertumbuhan TFP ini terutama dalam masa pandemic Covid 19. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah :

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
4. Program Peningkatan Daya Saing KUKM
5. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
6. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi
7. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Permasalahan :

TFP yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja yang lebih baik, jika tidak maka akan menambah pengangguran di Provinsi Jambi.

Solusi :

Upaya-upaya peningkatan kapasitas kemampuan angkatan kerja khususnya dalam penguasaan teknologi harus terus dilakukan, agar mereka dapat tertampung di dunia kerja.



Sasaran 6

Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

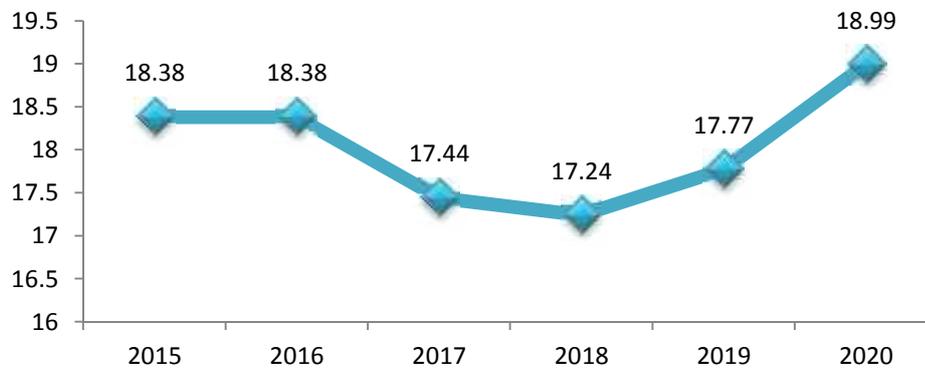
Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran strategis perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah ditandai dengan indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB, yang capaiannya pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB sebagai indikator sasaran perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38	21,50	18,99	88,33	22

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

Grafik 3.12 Share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi



Sumber: BPS, data diolah, 2020

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2020, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori **tinggi** karena mencapai 88,33%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana terlihat pada gambar di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Gambar 3.8. Pelatihan Kewirausahaan



Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2020 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain :

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
6. Program Peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan
7. Program Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan :

Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi dan kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri.

Solusi :

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang serta mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala.

Sasaran 7
Meningkatnya Ketahanan Pangan



Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah ketersediaan energi, dengan capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 3.047 kkal/kap/hari.

Tabel 3.17 capaian indikator ketersediaan energi sebagai indikator Sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.215	3.005	93,46	3.217

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2020 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar 113,753 Kg beras, dan selama kurun waktu tersebut telah digunakan sebanyak 71,534 Kg beras untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Merangin sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi di Gudang Perum Bulog per September 2020 sebesar 42,219 Kg beras.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 3.18 Cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

No	Tahun	Pengadaan CPPD (Kg)	Penggunaan CPPD (Kg)	Saldo/Stok (Kg)
1	2013	70.000	-	70.000
2	2014	20.000	3.449	86.551
3	2015	-	9.349	77.203
4	2016	-	22.839	54.364
5	2017	7.000	6.102	55.262
6	2018	12.000	5.400	61.862
7	2019	3.805	24.396	41.271
8	2020	948	0	42.219
Jumlah		113.753	71.534	42.219

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2020

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.005 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang.

Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

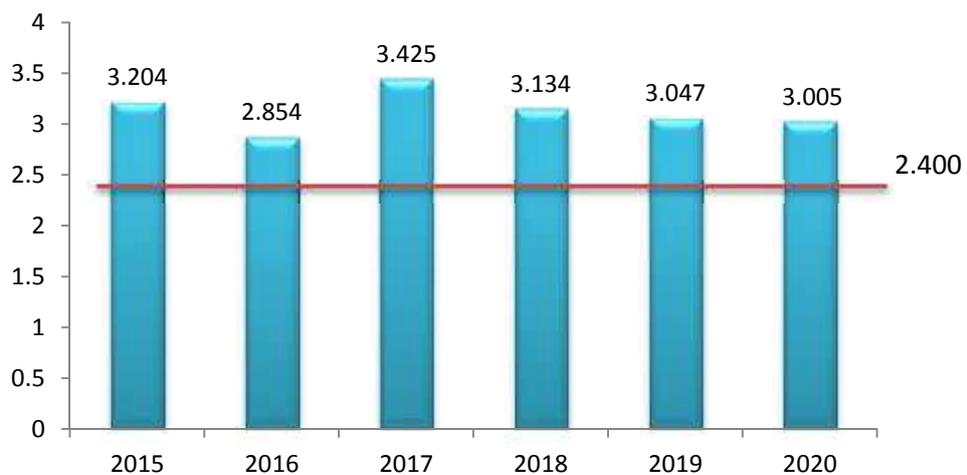
Tabel 3.19 Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi-Padian	1.520	1.200
2.	Umbi-Umbian	98	144
3.	Pangan Hewani	183	288
4.	Minyak Dan Lemak	712	240
5.	Buah Biji/ Berminyak	208	72
6.	Kacang-Kacangan	56	120
7.	Gula	141	120
8.	Sayuran dan Buah	128	144
9.	Lain-Lain	-	72
	Jumlah	3.005	2.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, data diolah, 2020

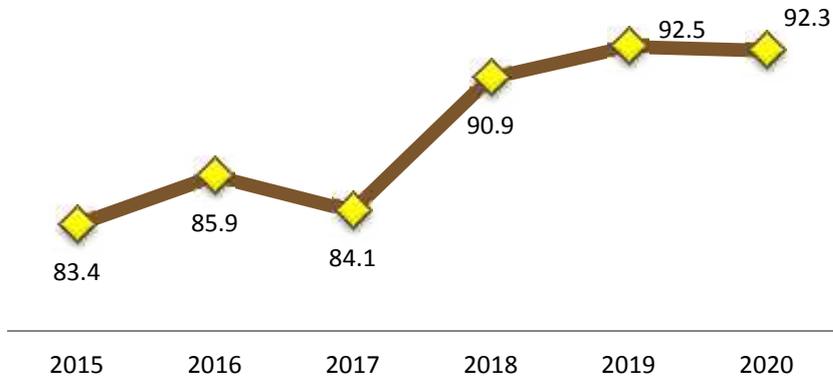
Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2020, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.005 Kkal/Kap/Hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 84,81. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012), walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3.215 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 93,46% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/kap/hari maka capaian ini telah mencapai 93,41% atau kategori sangat tinggi.

Diagram 3-13 Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari) Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, data diolah, 2020

Grafik 3.13 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2020

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di atas.

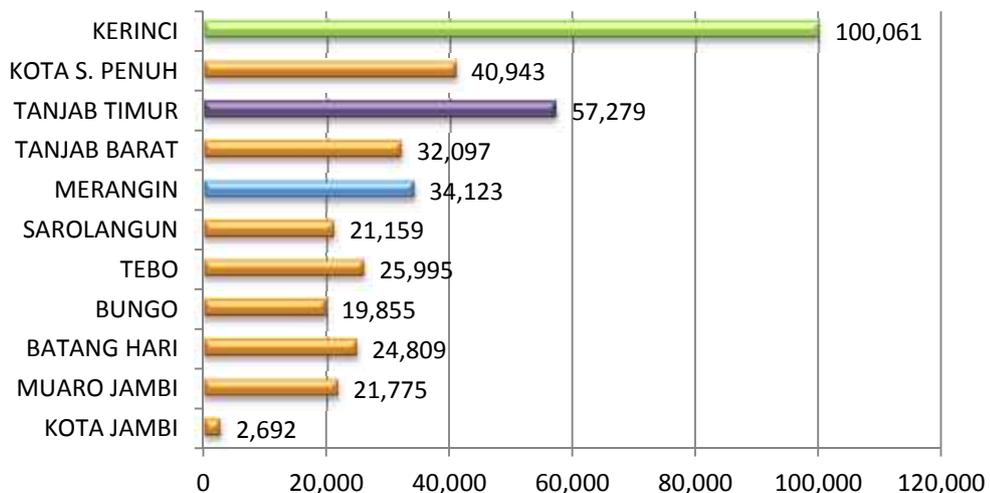
Ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebesar minimal 2.400 kkal/kap/hari. Ketersediaan Energi ini sangat bergantung pada Kondisi Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi, sehingga apabila produksi bahan pangan meningkat, ada kecendrungan ketersediaan energi akan meningkat. Berdasarkan hasil survey Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 69.536,06 hektar. Luas panen tertinggi terdapat pada Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 18.597,95 hektar, sementara luas panen terendah terdapat pada Kota Jambi dengan luas panen sebesar 322,07 hektar.

Gambar 3.9 Aktivitas Panen Padi Petani



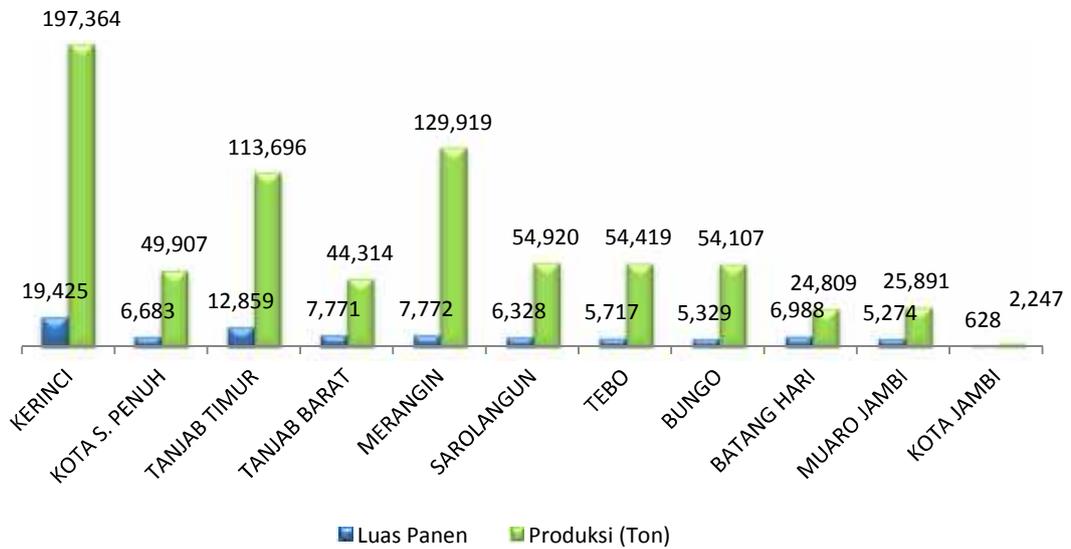
Produksi padi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 386.413 ton Gabah Kering Giling (GKG). Tiga wilayah dengan produksi padi (GKG) tertinggi di Provinsi Jambi berturut-turut adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh dengan produksi masing-masing sebesar 100.061 ton, 57.279 ton dan 40.943 ton. Sedangkan produktivitas padi Provinsi Jambi adaah sebesar 4,47 ton GKG/hektar, dengan produktivitas tertinggi terdapat pada Kab. Kerinci, Kab. Tanjab Timur, dan Kota Sei. Penuh dengan produktivitas sebesar 6,10 ton GKG/ hektar dan terendah pada Kabupaten Muaro Jambi dengan produktivitas sebesar 2,91 ton GKG/ hektar.

Diagram 3.14 Produksi padi Provinsi Jambi menurut Kabupaten-kota Tahun 2020 (ton GKG)



Sumber : BRS BPS, 2020

Diagram 3.15 Luas panen dan produksi padi menurut Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi, Tahun 2020



Sumber: BRS BPS, 2020

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi ternak.

Permasalahan :

1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Menurunnya penggunaan lahan sawah setiap tahunnya rata-rata sebesar 4.909 Ha (2,95%) dan ini terjadi penggunaan lahan irigasi rata-rata pertahun sebesar 105 Ha (0,25%), lahan non irigasi rata-rata pertahun sebesar 4.814 Ha (3,84%). Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit dan karet) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

2. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 terjadi kemarau yang cukup panjang yang berdampak pada kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran musim tanam.

3. Produksi tanaman pangan masih rendah

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran. Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal.

4. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdapat, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi. Selain itu, keterlambatan penyaluran benih ke lapangan masih sering terjadi sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut.

5. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh:

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi, BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih
- b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

6. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.

7. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen. Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Solusi :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.
3. Penyediaan benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan
4. Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.
6. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju komoditi tanaman pangan dan hortikultura
7. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan secara selektif
8. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru (terutama penggunaan benih unggul)
9. Mendorong sinergitas antar subsistem agribisnis
10. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru.
11. Mendorong peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura.
12. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran
13. Mendorong pola partisipasi aktif seluruh stakeholder
14. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia
15. Pemberdayaan petani dan masyarakat.
16. Meningkatkan efisiensi usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil

Sasaran 8

Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian



Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan aspek penting peningkatan produktivitas sektor produksi. Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

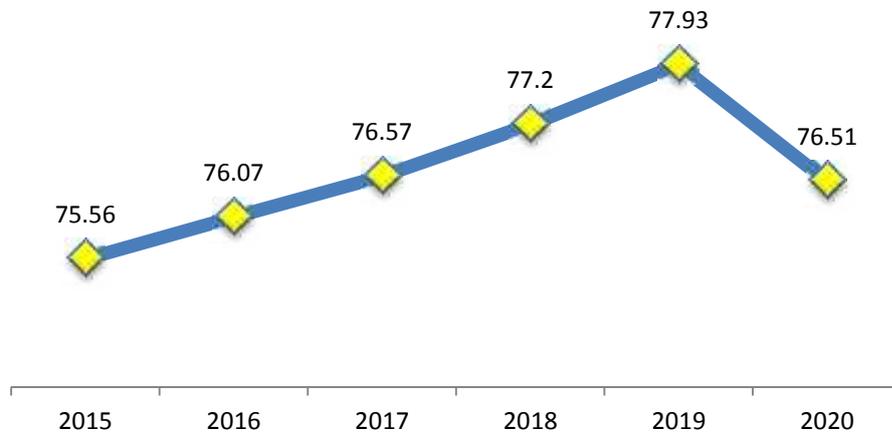
Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian ditunjukkan oleh indikator persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap. Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.20 Capaian persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap sebagai indikator Sasaran Strategis Meningkatnya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	75,56	78,93	76,51	96,93	79,54

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral., karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.

Grafik 3.14 Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2020

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Dalam rangka

mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 difokuskan pada pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2020 adalah sebesar 76,51%. Bila dibandingkan dengan target pada

Gambar 3.10 Ruas Jalan Provinsi Jambi



tahun 2020 sebesar 78,93%, maka persentase capaian ini mencapai 96,93% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini mencapai 96,19% atau sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut :

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi
- Kegiatan Rehab/pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi
- Perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv)
- Kegiatan Peningkatan jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)



Gambar 3.11 Aktifitas Perbaikan Jalan di Provinsi Jambi
Ruas Kabupaten Bungo

Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Diawal periode 2020 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program-program prioritas terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya

jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan

Permasalahan :

1. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.
2. Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.
3. Rasionalisasi anggaran tahun 2020 yang digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memutus mata rantai virus covid-19 pada Provinsi Jambi menyebabkan beberapa paket kegiatan pemeliharaan jalan tidak bisa dilaksanakan sehingga berdampak pada tidak tercapainya target kinerja tahun 2020.

Solusi :

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
3. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Sasaran 9

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik



Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing.

Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan



kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator yang menggambarkan capaian sasaran ini adalah Rasio Elektrifikasi, dimana capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.21 Capaian Rasio Elektrifikasi sebagai indikator Sasaran meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Rasio elektrifikasi	81,5	95	99,90	105,16	96

Pada tahun 2020, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 99,90. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95% atau terealisasi sebesar 105,16% dengan kriteria **sangat tinggi**. Capaian ini telah melewati target akhir tahun 2021 atau terealisasi mencapai 104,06% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3-22 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No.	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1.	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2.	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3.	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4.	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5.	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6.	Air Dikit,	25	-	-	-	-
7.	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8.	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Data-data lokasi potensi geothermal di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di atas. Potensi sumber energi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Gambar. 3.12. Sumber Energi Panas Bumi Kab. Kerinci



Tabel 3-23 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN	LOKASI	KET
1.	MERANGIN	Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		Desa Renah Pellaan Kec. Jangkat	200 KW
		Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		Desa Sepantai Renah	
		Desa Terapung Air Liki	
		Desa Terapung Air Liki Baru	
		Desa Terapung Ngaol Ilir	
Desa Tanjung Beringin			
2.	TEBO	Desa Semambu Kec. Sumay	
3.	KERINCI	Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4.	SAROLANGUN	Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		Desa Simpang Narso Kecil	
		Desa Padang Jering	
		Desa Pulau Langsat	
5.	BUNGO	Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

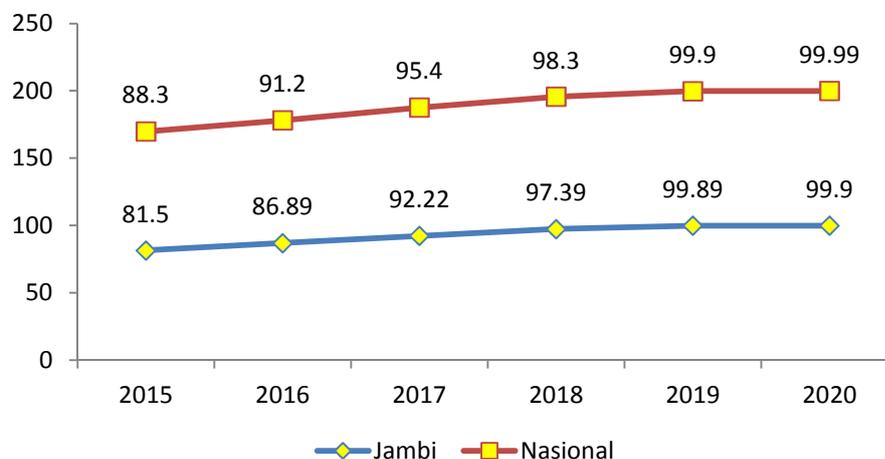
NO.	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1.	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2.	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3.	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4.	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5.	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6.	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7.	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8.	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9.	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10.	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System (SHS)* dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi. Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.15 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional



Sumber: Dinas ESDM, 2020

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, namun dengan gap yang semakin mengecil, bahkan pada tahun 2020 capaiannya selisih 0,09 dibanding nasional. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah Program Pengembangan Energi.

Permasalahan :

Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum dimanfaatkan secara maksimal

Solusi :

Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi

Sasaran 10

Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan irigasi



Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan.

Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi

Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan, sedangkan capaian pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi ditunjukkan oleh indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Gambar 3.13 Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak

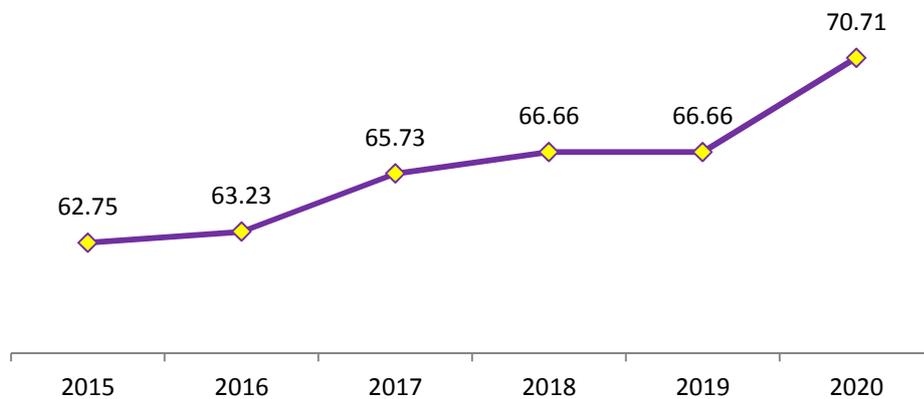


Tabel 3.25 Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih Tahun 2020

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	62,75	75	70,71	94,28	80

Pada tahun 2020, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 70,71 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75 persen atau terealisasi sebesar 94,28% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka realisasinya mencapai 88,38% dengan kategori tinggi.

Grafik 3.16 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2020

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 70,71%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75% atau hanya terealisasi sebesar 94,28% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini baru memenuhi 88,38% dari target akhir dan masih termasuk dalam kategori tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional.

Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

Gambar 3.14 Potret kebutuhan air bersih dan sanitasi layak



Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

2. Persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2020 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Pada tahun 2020, capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 76,89 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 84 persen atau terealisasi sebesar 91,53% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka realisasinya mencapai 84,49 persen dengan kategori tinggi. Capaian tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2019, dimana pada tahun 2019 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 73,3 persen.

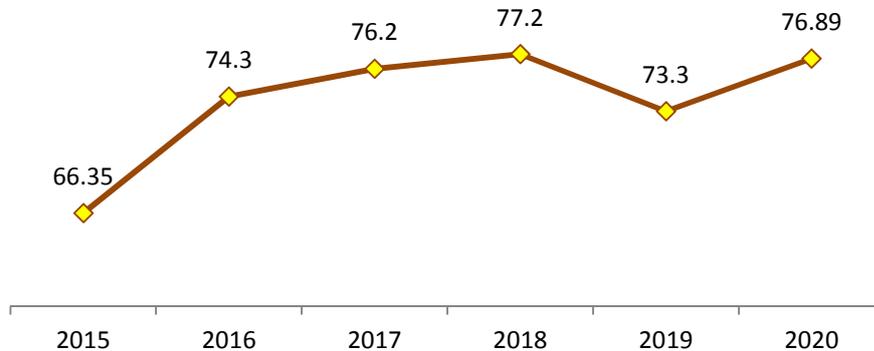


Gambar 3.15. Daerah irigasi di Kab. Kerinci

Tabel 3-26 Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebagai indikator sasaran pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi Tahun 2020

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	66,36	84	76,89	91,53	91

Grafik 3.17 Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2020

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian.

Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air.

Permasalahan :

Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi karena beberapa faktor, salah satunya faktor alam seperti longsor yang penanganannya tidak bisa langsung pada tahun anggaran tersebut.

Solusi :

Percepatan rehabilitasi jaringan pada Tahun Anggaran 2021.



Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan.

Keinginan luhur tersebut diejawantahkan dalam salah satu sasaran strategis daerah, yaitu “meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Capaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 3-27 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan

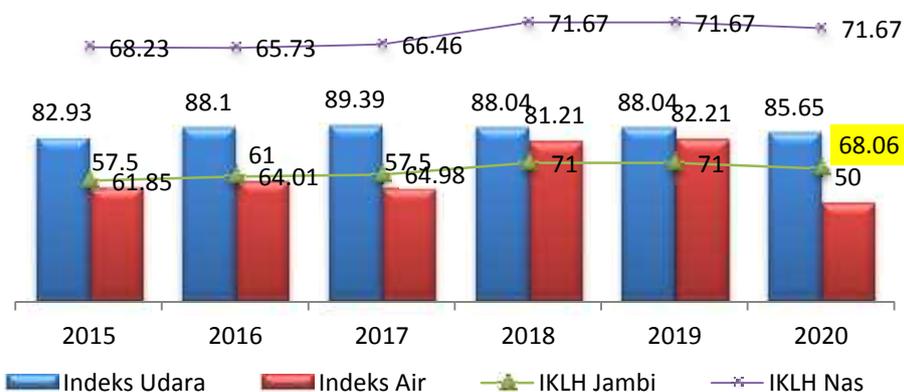
Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	65	68,06	104,70	66

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, dan kualitas udara ambien. IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

Data realisasi IKLH tahun 2020 yang disampaikan pada laporan ini merupakan data yang dirilis pada tahun 2020 dan merupakan kondisi tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH Provinsi Jambi melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 104,70% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir, maka realisasi ini telah mencapai 103,12% dari target akhir IKLH pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 66 atau telah terealisasi sangat tinggi.

Diagram 3.16 Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional

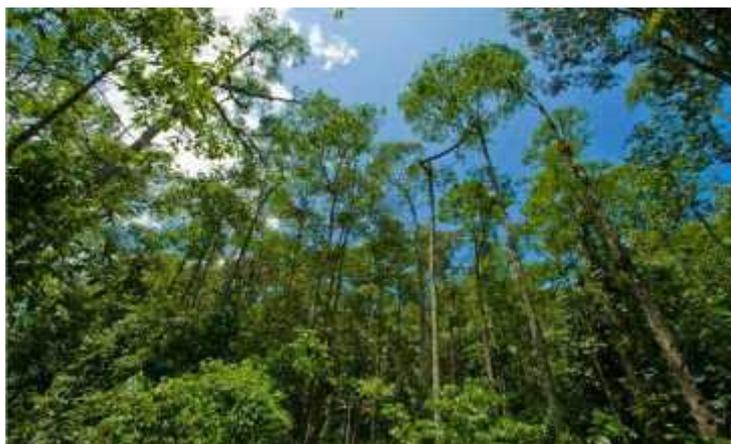


Sumber: Kemen LH (diolah), 2020

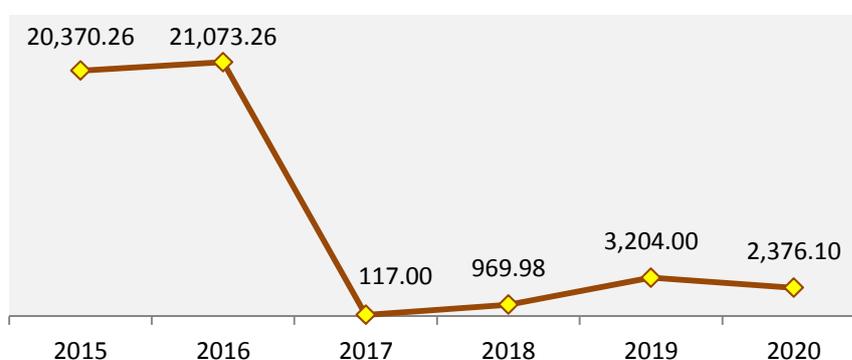
Gambar di atas memperlihatkan bahwa IKLH Provinsi Jambi masih terus dibawah IKLH Nasional, namun terlihat perbaikan yang lebih cepat dibanding nasional Bahkan pada tahun 2020 selisih antara IKLH Nasional dan Provinsi Jambi terpaut 3,61. Namun demikian, upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus tetap dilakukan secara masif. Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 3.204 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 0,37 persen.

Gambar 3.16 Luas Kawasan Tertutup Pohon



Grafik 3.18 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2015-2020

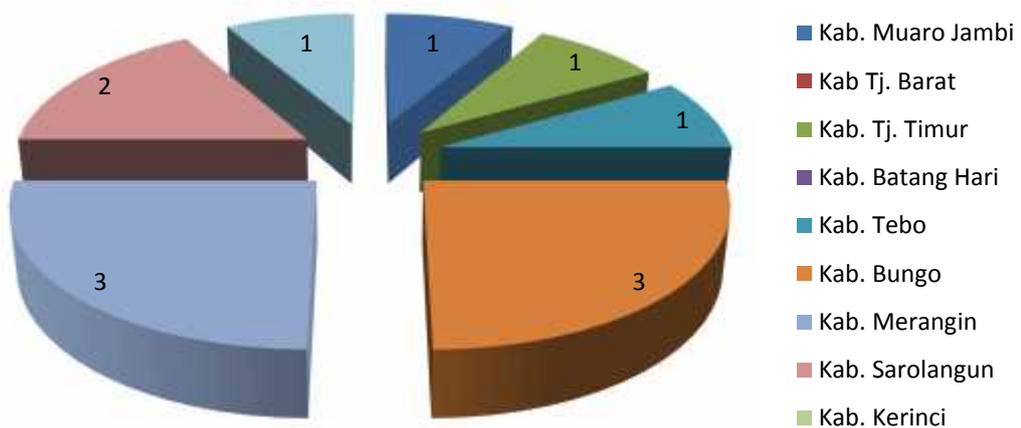


Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2020

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 tidak terlalu berat karena pemahaman penduduk/perusahaan terhadap tata kelola lahan sudah semakin baik.

Berdasarkan data pemantauan hot spot, terdapat 12 hot spot dengan kategori high conf rate >80% di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

Gambar 3.17 Sebaran Hotspot Kategori High (conf.rate >80%) di Provinsi Jambi Tahun 2020

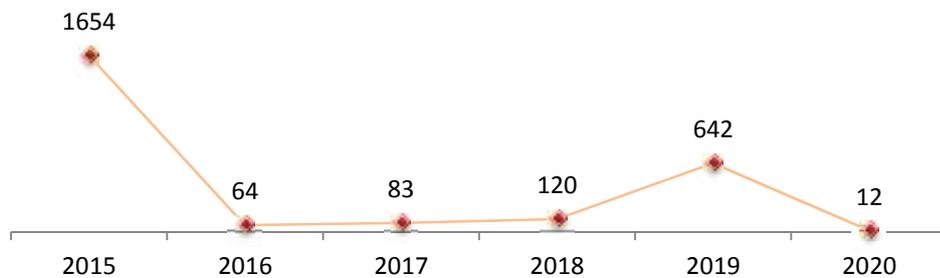


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2020

Gambar 3.18 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

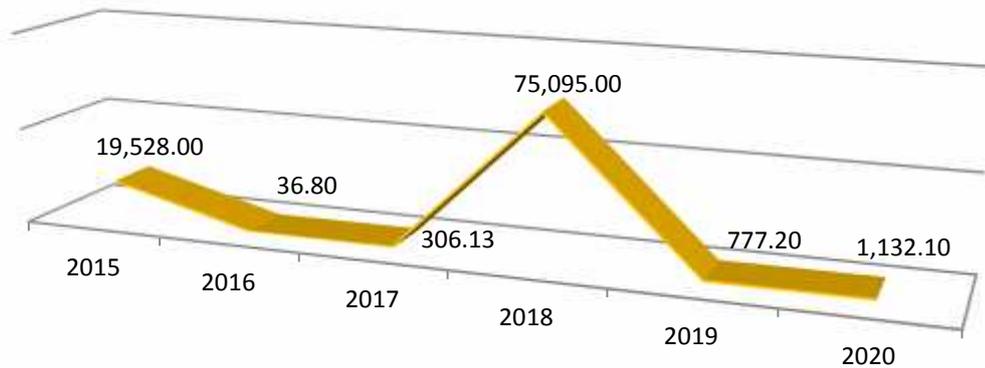


Grafik 3.19 Perkembangan Jumlah Hot spot Kategori High (conf.rate >80%) di Provinsi Jambi



Sumber: Dinas Kehutanan Prov.Jambi, 2020

Grafik 3-20 Luas Lahan dan Hutan (Ha) terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2020

Sumber daya alam bukan hanya hutan, namun semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Salah satunya adalah pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.



Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai

tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain :

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pengusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*.

Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Landrent* dan *royalti* dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terkait dengan kepatuhan PNBP, pada tahun 2020 Provinsi Jambi mendapatkan Juara III Penghargaan Subroto Bidang Kepatuhan PNBP Mineral dan Batubara Kategori Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Terbaik.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
2. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
5. Program Pemanfaatn Potensi Sumber Daya Hutan

6. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Permasalahan :

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal.
3. Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara

Solusi :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.
3. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
4. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

Sasaran 12

Menurunnya Angka Kemiskinan



Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan, dan capaian tahun 2020 terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.19 Ilustrasi Kondisi Kemiskinan



Tabel 3.28 Capaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Angka Kemiskinan	9,12	7,57	7,58	99,09	7,4

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 101,13%, atau masuk **kategori sangat tinggi** dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya telah mencapai 97,62% dan juga termasuk kategori sangat tinggi.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi periode Maret 2011-Maret 2020 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada periode Maret-September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan secara absolut selama periode Maret 2011-Maret 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari 272,77 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 277,80 ribu orang pada Maret 2020. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.20 Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Jambi



Diagram 3.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2011-2020



Sumber : BRS 2020

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada Maret 2020 sebanyak 277,80 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019, maka selama enam bulan tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,4 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penambahan sebanyak 8,5 ribu orang dan daerah pedesaan turun sebesar 4,0 ribu orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 9,75 persen menjadi 10,41 persen. Sedangkan di pedesaan turun dari 6,44 persen menjadi 6,23 persen dibandingkan dengan September 2019.

Tabel 3.29 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020

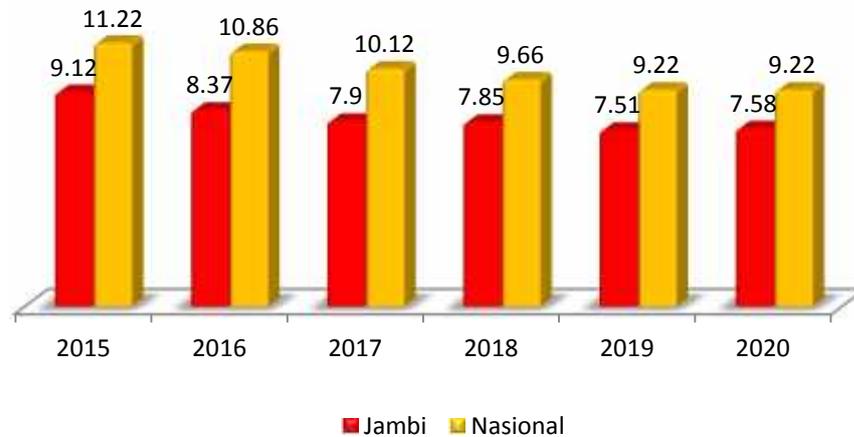
Daerah	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (000)		
	Maret 2019	September 2019	Maret 2020	Maret 2019	September 2019	Maret 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota	9,81	9,75	10,41	115,08	115,16	123,64
Perdesaan	6,53	6,44	6,23	159,24	158,20	154,16
Kota+Perdesaan	7,60	7,51	7,58	274,32	273,37	277,80

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2019, September 2019, dan Maret 2020

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2019-Maret 2020.

Selama periode September 2019-Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,09 persen, yaitu dari Rp 464.558 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 483.542 per kapita per bulan pada Maret 2020. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2020 sebesar 76,13 persen.

Diagram 3.18 Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional



Sumber: BPS, 2020

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2020, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,169 pada Maret 2019 menjadi 1,096 pada September 2020. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,264 menjadi 0,251 pada periode yang sama.

Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Demikian pula pada nelayan dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil dan investasi pertanian
2. Program pengembangan usaha peternakan
3. Program pengembangan perikanan budidaya
4. Program pengembangan perikanan tangkap
5. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
6. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
7. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
8. Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
9. Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Permasalahan:

Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

Solusi :

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi.
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian.



Sasaran 13

Menurunnya Angka Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

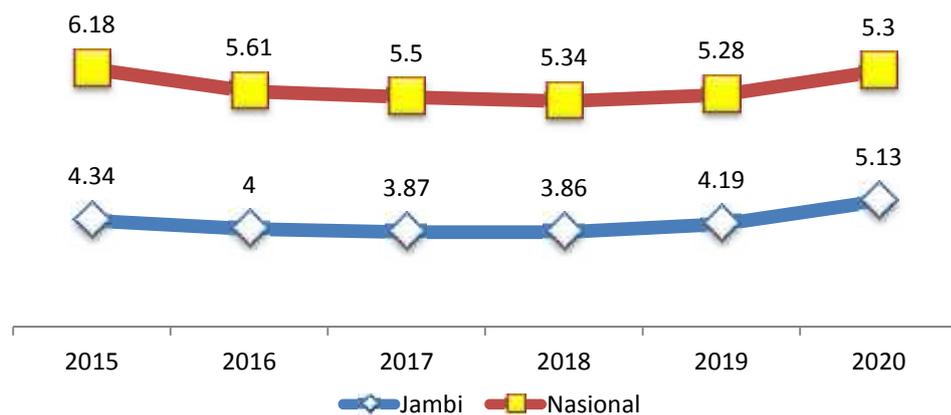
Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3-30 Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20%	3%	5,13%	58,46	2,8%

Capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19. TPT Tahun 2020 sebesar 5,13 % atau meningkat 1,07% dibandingkan kondisi tahun 2019 dan terealisasi sebesar 55,6% (**rendah**). Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 54,58% dari target sebesar 2,8%. Namun demikian, TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dibandingkan nasional dan beberapa daerah lainnya.

Grafik 3.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus)

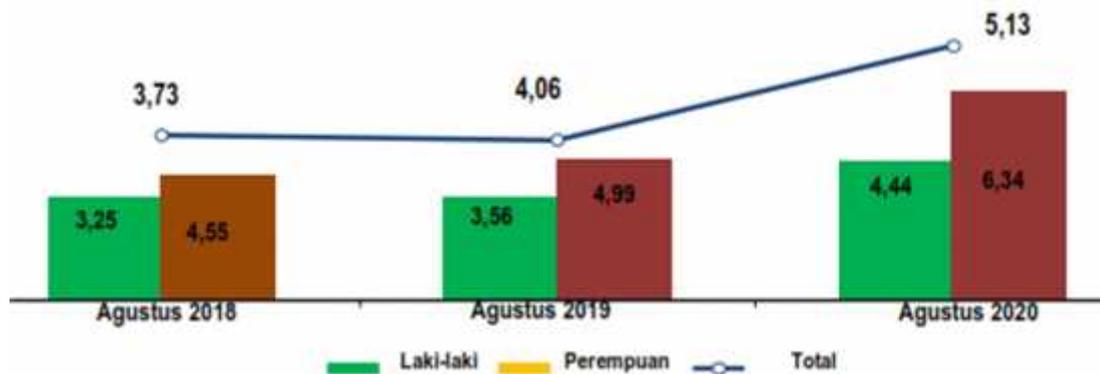


Sumber: BPS, 2019

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

TPT laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Agustus 2020, TPT laki-laki adalah sebesar 4,44 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,34 persen. Dibandingkan Agustus 2019, peningkatan TPT laki-laki (0,88 persen poin) lebih rendah dibandingkan perempuan (1,35 persen poin).

Diagram 3.19 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus 2018–Agustus 2020



Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 46,44 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,54 persen; dan Konstruksi sebesar 4,68 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan Agustus 2019.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi jika dibandingkan dengan Agustus 2019 adalah Pertambangan dan penggalian (1,21 persen poin), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,52 persen poin); Transportasi dan pergudangan (0,27 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran (0,12 persen poin); Jasa Keuangan dan asuransi (0,11 persen poin); Pengadaan listrik dan gas (0,06 persen poin); serta Jasa lainnya (0,01 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Industri Pengolahan (0,53 persen poin); Administrasi Pemerintahan (0,54 persen poin); Konstruksi (0,39 persen poin); Jasa Pendidikan (0,36 persen poin); Penyediaan Akomodasi makan dan minum (0,24 persen poin); Jasa Perusahaan (0,16 persen poin); serta Jasa Kesehatan (0,07 persen poin).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri,

Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Gambar 3.21 Pelatihan Menjahit bagi Wirausaha Baru



Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
2. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja
3. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Permasalahan :

1. TPT di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan menengah kejuruan dan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.
2. Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi
Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020.

Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Solusi :

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
 - b. Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
 - c. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.



Sasaran 14

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

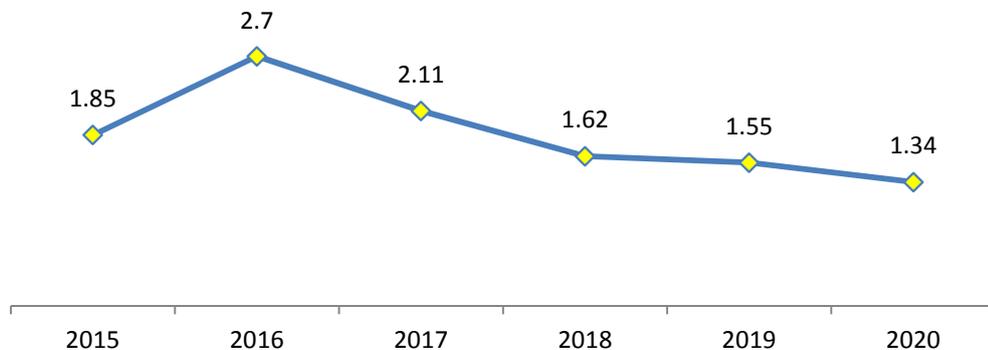
Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pencapaian sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk diukur dari indikator laju pertumbuhan penduduk dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.31 Capaian laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir RPJMD 2021
		Target	Realisasi	% Capaian	
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	1,91	1,34	142,53	1,82

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 1,34. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,91 atau terealisasi sebesar 142,53% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, capaian ini juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan sebesar 1,82 atau terealisasi 135,82% dengan kategori capaian sangat tinggi.

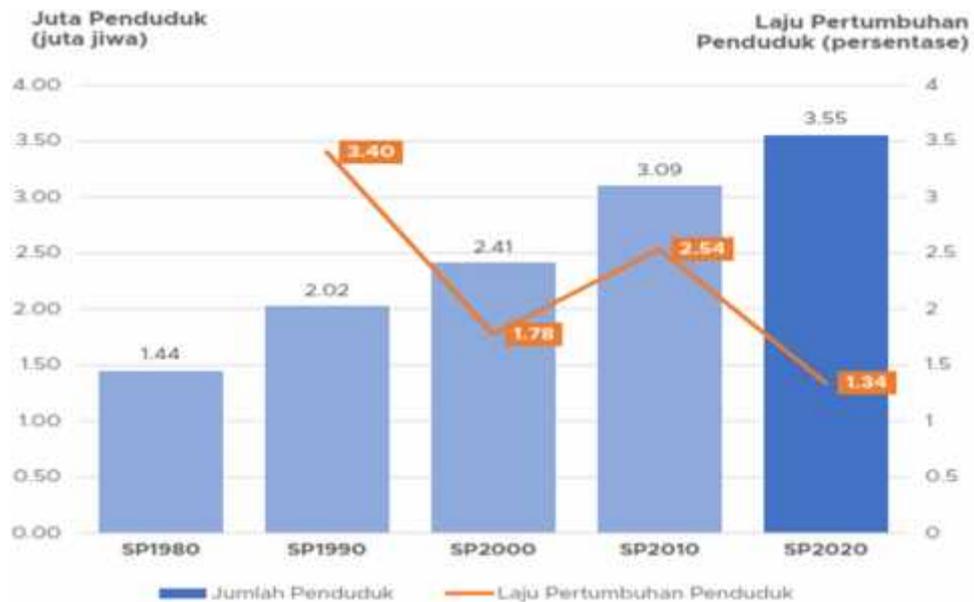
Grafik 3.22 Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: DP3AP2 dan BPS, 2020

SP2020 mencatat penduduk Provinsi Jambi pada bulan September 2020 sebanyak 3,55 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami penambahan sekitar 455,96 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 45,60 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,34 persen per tahun.

Diagram 3.20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020



Jika dilihat pada diagram diatas, terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk lebih satu persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,54 persen. Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya penambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan.

Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. seperti transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Prinsipnya. Pertumbuhan harus dibatasi, dan setiap lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. karena dengan pertumbuhan yang terkendali akan mempermudah pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan KB. Bila dilihat dari komposisi usia penduduk, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

Permasalahan :

Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

Solusi :

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.
2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk pertumbuhan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

3.2 Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2020 adalah sebesar 88,86% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 94,52%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dan realisasi terbesar berada pada sasaran strategis menurunnya angka pengangguran. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK yang terlambat sehingga penyiapan administrasi terlambat dan hal-hal lainnya, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap optimal. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32 Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	172.330.213.444,41	167.556.666.531,99	97,23
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	289.125.196.587,-	243.530.153.085,23	84,23
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	2.643.087.611,-	2.537.364.106,56	96,05
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	52.069.613.000,-	50.549.180.300,40	97,08
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	7.706.281.455,-	7.539.825.775,57	97,84
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	15.392.270.302,-	13.930.004.623,31	90,50
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	6.440.626.982,-	6.291.848.498,72	97,69
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	322.643.385.577,14	312.318.797.238,67	96,80
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	519.026.301,-	473.351.986,51	91,20
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	33.903.182.482,-	32.306.342.587,10	95,29
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	13.677.127.148,-	12.272.486.189,90	89,73
12.	Menurunnya angka kemiskinan	21.598.410.106,-	20.397.538.504,11	94,44
13.	Menurunnya angka pengangguran	5.199.238.866,32	5.131.648.761,06	98,70
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	506.562.621,-	488.883.585,53	96,51
				Rata-rata
				94,52

Sumber: Badan Keuangan Daerah (unaudited, diolah), 2020

Tabel 3.33 Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	%
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	97,23	100%	102,85
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	84,23	99,71	118,38
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	96,05	133,98	139,49
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	97,08	90,60	93,33
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	97,84	292,14	298,59
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	90,50	82,79	91,48
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	97,69	93,47	95,68
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	96,80	96,93	98,11
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	91,20	105,16	115,31
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	95,29	92,91	97,50
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	89,73	104,71	116,69
12.	Menurunnya angka kemiskinan	94,44	99,86	105,74
13.	Menurunnya angka pengangguran	98,70	58,47%	59,24
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	96,51	142,53	147,68

Sumber: Badan Keuangan Daerah (unaudited, diolah), 2020

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bila realisasi anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2020, dimana rata-rata realisasi anggaran sebesar 94,52% dan capaian kinerja sebesar 113,80%, maka terlihat adanya efektivitas penggunaan anggaran pada tahun 2020.





BAB IV PENUTUP

Bab IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) merupakan pengejawantahan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2020 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama, partisipasi dan komitmen seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat yang diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga target Jambi TUNTAS 2021 dapat terwujud.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung dengan upaya-upaya yang lebih baik oleh berbagai pihak. Secara umum, sebagai pelaksanaan tahun ketiga periode RPJMD Tahun 2016-2021, kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah baik, karena 12 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, dan hanya 1 indikator dengan kriteria rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2020, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya.

Selain itu Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai e-planning adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk) dan penilaian akuntabilitas kinerja melalui SKP Online dan e-SAKIP.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. **Pertama**, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, Inovasi menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Jambi. Perubahan-perubahan kebijakan yang tiba-tiba terutama terkait dengan penghematan anggaran, menuntut adanya inovasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga kekurangan anggaran bukan lagi menjadi persoalan yang penting yang menghambat pembanguna di Provinsi Jambi.

Keempat, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Lampiran 1
PERNYATAAN REVIU APIP ATAS LKjIP



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telp. (0741) 61606 Fax. (0741) 62317
JAMBI - 36122

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, Maret 2021



FERDIANSYAH, S.STP., M.A.
Pembina
NIP. 19800701 199912 1 001

Lampiran 2

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No.	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2020			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	100%	B	100
2.	Indeks Pembangunan Manusia	68,24	71,5	71,29	99,71	71,8	99,29
3.	IDG	61,93	66,01	88,44	133,98	67,01	131,98
4.	Indeks Demokrasi Indonesia	70,68	77	69,76	90,60	79	88,30
5.	Total Factor Productivity (TFP)	NA	1,4	4,09	292,14	1,5	272,67
6.	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38	21,50	18,99	88,33	22,00	80,91
7.	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.125	3.005	93,47	3.217	93,41
8.	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	75,56%	78,93%	76,51%	96,93	79,54%	96,19
9.	Rasio Elektrifikasi	81,5	95%	99,90	105,16	96	104,06
10.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75%	75%	70,71%	94,28%	80%	88,39
11.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35	84	76,89	91,54	91	84,49
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	65%	68,06%	104,71	66	103,12
13.	Angka Kemiskinan	9,12%	7,57%	7,58%	99,86	7,4	102,43
14.	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%	3%	5,13%	58,47%	2,80%	54,58
15.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	1,91%	1,34%	142,53	1,82	135,82

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



Pemerintah Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum.

Jabatan : Gubernur Jambi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2020

GUBERNUR JAMBI

TTD

Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	66,01
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	77
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,4
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	21,50%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.215
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	95%
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	75%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	84%
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65
12.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,57%
13.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3%
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,91%

Jambi, Januari 2020

GUBERNUR JAMBI

TTD

Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

Lampiran 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2021

GUBERNUR JAMBI,

TTD

Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M. Hum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	71,8
3.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,01
4.	Terwujudnya ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	78
5.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)	1,5
6.	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB	22,00%
7.	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.217
8.	Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	79,54%
9.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	96%
10.	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	80%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	91%
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66
12.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,40%
13.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	2,8%
14.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,82%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1,958,999,520,058.00
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 789,342,560,726.00
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp 1,641,169,562.00
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 43,621,589,449.00

Laporan Kinerja Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Jambi

	Program		Anggaran
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	108,832,000.00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	126,264,094,765.00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1,007,292,406.00
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	519,629,098.00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	718,793,812.00
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	46,698,017,391.00
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	1,016,199,970.00
12	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	825,206,951.00
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	1,113,682,423.00
14	Program Pengembangan Permukiman	Rp	5,679,643,000.00
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	41,666,354,530.00
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	101,953,200,187.00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	3,010,547,336.00
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	4,749,999,150.00
19	Program Pengembangan Perumahan	Rp	1,423,024,460.00
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	18,256,846,713.00
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	4,554,261,700.00
22	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	499,973,385.00
23	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	2,498,491,600.00
24	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	897,524,320.00
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	582,148,720.00
26	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	1,499,999,980.00
27	Program Penanggulangan Bencana	Rp	4,232,125,726.00
28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	187,412,900.00
29	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	1,679,468,462.00
30	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	150,000,000.00

Laporan Kinerja Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Jambi

	Program		Anggaran
31	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	4,889,787,905.00
32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	523,916,111.00
33	Program Penanganan Bencana	Rp	233,086,143.00
34	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	629,996,514.00
35	Program Pencatatan Sipil	Rp	659,829,986.00
36	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	1,949,697,883.00
37	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	149,994,038.00
38	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	70,000,200.00
39	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1,195,209,079.00
40	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	582,852,791.00
41	Program Hubungan Industrial	Rp	400,112,640.00
42	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	631,169,564.00
43	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	139,997,966.00
44	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	73,668,540.00
45	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp	415,299,680.00
46	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	1,333,753,811.00
47	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1,951,476,906.00
48	Program Pengendalian Penduduk	Rp	100,735,030.00
49	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	3,144,416,494.00
50	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	2,220,047,215.00
51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	239,814,780.00
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	473,168,810.00
53	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	650,000,000.00
54	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1,916,258,558.00
55	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp	133,000,000.00
56	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	307,282,000.00
57	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	9,274,951,053.00
58	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	600,653,934.00
59	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	9,908,742,954.00
60	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	1,755,553,053.00

Laporan Kinerja Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Jambi

	Program		Anggaran
61	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	315,062,650.00
62	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	482,050,533.00
63	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	319,621,400.00
64	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	399,423,500.00
65	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	241,499,850.00
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	2,352,078,592.00
67	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	1,130,351,901.00
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp	694,999,893.00
69	Program Pengembangan Umkm	Rp	499,999,780.00
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	3,679,285,986.00
71	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	27,708,455,570.00
72	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	2,737,080,000.00
73	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	2,250,506,408.00
74	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	437,406,040.00
75	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	840,233,616.00
76	Program Pengelolaan Arsip	Rp	817,906,774.00
77	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	1,239,197,616.00
78	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	3,915,120,792.00
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1,671,100,832.00
80	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp	644,400,866.00
81	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	2,051,854,721.00
82	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	1,431,977,414.00
83	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	1,699,699,100.00
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	21,903,562,687.00
85	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	13,648,938,861.00
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	514,984,482.00
87	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	855,531,906.00
88	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	74,999,910.00
89	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1,056,428,643.00
90	Program Pengelolaan Hutan	Rp	6,193,510,560.00
91	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp	1,185,963,903.00
92	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan	Rp	1,371,612,220.00

Laporan Kinerja Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Jambi

	Program		Anggaran
	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
93	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	187,516,445.00
94	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	158,525,200.00
95	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	249,842,550.00
96	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	5,128,179,057.00
97	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	940,196,560.00
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	31,339,000.00
99	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	916,872,100.00
100	Program Pengembangan Ekspor	Rp	390,475,580.00
101	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	1,687,009,228.00
102	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	5,254,282,925.00
103	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	67,749,645,120.00
104	Program Penataan Organisasi	Rp	1,836,583,570.00
105	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	1,897,062,452.00
106	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	63,725,474,035.00
107	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	1,822,033,650.00
108	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1,388,760,040.00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	7,631,723,465.00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	2,994,789,020.00
111	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	4,330,448,220.00
112	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	3,739,494,619.00
113	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	979,817,419,454.00
114	Program Kepegawaian Daerah	Rp	3,013,723,992.00
115	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	6,405,471,435.00
116	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	2,207,559,670.00

Jambi, Januari 2021

GUBERNUR JAMBI,

TTD

Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi**

2021

